

BAB III

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PPDRB)

PPDRB menggambarkan kemampuan Kabupaten Sleman dalam menciptakan *out put* (nilai tambah) pada waktu tertentu. PPDRB dibentuk melalui berbagai sektor ekonomi, yang mencakup; sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, lembaga keuangan, dan jasa-jasa lainnya.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2008, kondisi perekonomian Kabupaten Sleman pada tahun 2008 secara makro meningkat. PPDRB atas harga berlaku mencapai Rp. 11,22 trilyun. Angka tersebut meningkat 15,43 persen dibanding tahun 2007 yang pencapaiannya hanya sebesar Rp. 9,72 trilyun.

Kontribusi tertinggi PPDRB diperoleh dari sektor tersier seperti; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa lainnya yang mencapai sebesar 55,28 persen. Sektor sekunder seperti; industri pengolahan; listrik, gas, air bersih, dan bangunan memberikan kontribusi pada PPDRB sebesar 27,84 persen. Dan adapun sektor primer seperti; pertanian; pertambangan dan penggalan memberikan

sumbangan sebesar 16,86 persen. Kontribusi sektor tersier dan sekunder dari tahun ke tahun cenderung meningkat, sedangkan kontribusi sektor primen cenderung menurun.

Dengan demikian dalam pandangan penulis, pada tahun 2008 kondisi perekonomian Kabupaten Sleman secara makro mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007, dimana PPDRB atas harga pada tahun 2008 mencapai Rp. 11,22 trilyun meningkat 15,43 persen dari tahun 2007 yang hanya sebesar Rp. 9,72 trilyun. Peningkatannya sangat signifikan, yang bila dinominalkan mencapai 1,5 trilyun. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dari pemerintah Kabupaten Sleman dalam berusaha untuk mewujudkan peningkatan PPDRB setiap tahunnya.

b. Laju Inflasi

Laju Inflasi merupakan gambaran kenaikan/ penurunan harga dari jenis barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Angka inflasi disajikan pada tingkat provinsi. Tingkat inflasi di Provinsi DIY pada tahun 2008 mencapai 9,88 persen lebih tinggi dari inflasi tahun 2007 yang hanya 7,99 persen. Walau demikian, inflasi tahun 2008 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2005 yang masing-masing mencapai 10,40 persen dan 14,98 persen.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan laju inflasi Provinsi DIY pada tahun 2008 lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang mencapai 11,06 persen. Sementara pada tahun 2007 dan 2006 laju inflasi Provinsi DIY lebih tinggi dibandingkan dengan nasional dimana di Provinsi DIY inflasinya mencapai

7,99 persen dan 10,40 persen sementara nasional 6,59 persen dan 6,60 persen. Dan adapun pada tahun 2005 inflasi DIY jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional, 14,98 persen berbanding 17,11 persen. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Perbandingan Inflasi DIY dan Nasional 2005-2008

Daerah Istimewa Yogyakarta			Nasional	
Tahun	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Inflasi	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Inflasi
2008	113,32	9,88	113,86	11,06
2007	156,55	7,99	150,49	6,59
2006	144,59	10,40	141,98	6,60
2005	126,50	14,98	125,09	17,11

Sumber: BPS DIY, DIY dalam Angka 2009

Oleh karenanya, dilihat dari segi laju inflasi sekalipun tingkat inflasi Provinsi DIY pada tahun 2008 lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 dengan 7,99 persen hal ini menunjukkan tidak adanya persoalan ekonomi yang serius di Provinsi DIY, dan khususnya di Kabupaten Sleman. Karena pada tahun 2008 tingkat inflasi nasional jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi DIY yang mencapai 11,06 persen, padahal Provinsi DIY sendiri hanya 9,88 persen. Oleh karenanya tidak menutup kemungkinan peningkatan laju inflasi pada tahun 2008 di Provinsi DIY merupakan akibat dari tingginya angka inflasi nasional.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional neto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.

Berdasarkan LPPD 2008, dinamika kondisi perekonomian daerah seperti yang dijelaskan dalam PDRB Kabupaten Sleman telah mewujudkan PDRB per kapita sebesar Rp 10,7 juta pada tahun 2008. Angka tersebut lebih tinggi 10,3 persen, dibanding pencapaian tahun 2007 sebesar Rp 9,7 juta. Oleh karenanya, menurut penulis dalam PDRB per kapita Kabupaten Sleman pada tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan peningkatan sebesar 10,3 persen tersebut.

d. Ketimpangan Kemakmuran dan Pemerataan Pendapatan

Untuk melihat Ketimpangan Kemakmuran dan Pemerataan Pendapatan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Angka Ketimpangan Kemakmuran dan Pemerataan Pendapatan
di Kabupaten Sleman, 2008

Tahun	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006	17,43	34,78	47,79	0,368
2007	19,09	37,18	43,73	0,326
2008	17,67	35,35	46,99	0,322

Sumber: BPS DIY, Sesenas 2006, 2007, 2008

Dengan melihat data di atas, Ketimpangan Kemakmuran dan Pemerataan Pendapatan untuk 20 persen Tertinggi pada tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 46,99 persen, padahal tahun 2007 hanya sebesar 43,73 persen, walau bila dibanding tahun 2006 tetap saja rendah, karena pada tahun 2006 mencapai 47,79 persen. Sementara 40 persen Menengah mengalami penurunan dari 37,18 dan 34,78 persen pada tahun 2007 dan 2006 menjadi 35,35 persen pada tahun 2008. Dan 40 persen Terendah pun mengalami

penurunan dari 19,09 persen pada tahun 2007, menjadi 17,67 persen pada tahun 2008.

Dengan demikian secara keseluruhan pada tahun 2008 Angka Ketimpangan Kemakmuran di Kabupaten Sleman mengalami penurunan untuk 40 persen Terendah dan 40 persen Menengah. Maka dilihat dari aspek ini pada tahun 2008 kinerja pemerintah Kabupaten Sleman lebih baik dibandingkan dengan tahun 2007. Terkait dengan 20 persen Tertinggi mengalami kenaikan, artinya jarak penduduk miskin dengan non miskin semakin menganga, tentunya tidak terlepas dari tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 yang mencapai 22,25 persen dari total keseluruhan jumlah KK yang ada. Sementara di sisi lain kekayaan kelas atas terus bertambah, disinilah terjadinya ketimpangan dalam distribusi ekonomi. Maka tentunya ke depan, Angka Ketimpangan Kemakmuran untuk 20 persen Tertinggi ini harus ditekan, supaya tidak ada jarak yang menganga antara orang miskin dan orang kaya.

e. Ketimpangan Regional

Seperti yang penulis jelaskan di poin "d" berdasarkan data Indeks Gini dan pemerataan pendapatan maka untuk Negara berkembang, Koefisiensi Gini berkisar antara 0,3000 sampai dengan 0,4000 termasuk dalam kategori sedang¹. Dimana Indeks Gini Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun mengalami penurunan angka, pada tahun 2006 sebesar 0,368, pada tahun 2007 sebesar 0,326 persen, dan pada tahun 2008 sebesar 0,322 persen². Maka hal ini menjadi poin positif bagi

¹ Lampiran PP No. 6/ 2008

² BPS DIY, DIY dalam Angka 2009

kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan tekanan terhadap Ketimpangan Regional.

Dengan melihat kelima aspek dari indikator Kesejahteraan Masyarakat dilihat dari aspek Kesejahteraan itu maka terdapat sisi positive dan negatifnya. Untuk Pemerataan Ekonomi pada tahun 2008 di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan positive dibandingkan dengan tahun 2007. Dengan PPDRB yang meningkat sebesar 15,43 persen, PDRB per kapita meningkat 10,3 persen. Sementara Ketimpangan Kemakmuran dan Pemerataan Pendapatan untuk 40 persen Terendah dan Menengah mengalami penurunan menjadi 17,67 dan 35,35 persen. Dan Ketimpangan Regional yang juga mengalami penurunan dari 0,326 persen tahun 2007 menjadi 0,3222 persen pada tahun 2008.

Sementara dilihat dari laju inflasi sekalipun pada tahun 2008 inflasi Provinsi DIY lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 2007. Dimana pada tahun 2007 hanya mencapai 7,99 persen menjadi 9,88 persen pada tahun 2008. Tetapi bila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi di Provinsi DIY tetap masihlah lebih rendah, mengingat inflasi nasional mencapai angka 11,06 persen³. Maka dengan demikian sebetulnya tidak ada persoalan ekonomi yang besar di Provinsi DIY pada tahun 2008.

Dan adapun untuk kelemahan yang harus mendapatkan perhatian serius, pada tahun 2008 terjadi peningkatan yang cukup besar pada Ketimpangan Kemakmuran dan Pemerataan Pendapatan dilihat dari 20 persen Tertinggi. Pada tahun 2008 meningkat menjadi 46,99 persen dari tahun 2007 yang hanya sebesar

³ BPS DIY, DIY dalam Angka Tahun 2009

43,73 persen. Artinya jarak penduduk miskin dengan non miskin semakin menganga, tentunya tidak terlepas dari tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 yang mencapai 22,25 persen dari total keseluruhan jumlah KK yang ada. Sementara di sisi lain kekayaan kelas atas terus bertambah, disinilah terjadinya ketimpangan dalam distribusi ekonomi. Oleh karenanya hal ini harus menjadi catatan tersendiri, dimana seharusnya 20 persen Tertinggi dalam Ketimpangan Kemakmuran dan Pemerataan Pendapatan pun haruslah turun angkanya seperti 40 persen Terendah dan Menengah.

2. Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

1) Angka Melek Huruf (AMH)

AMH merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Berdasarkan LPPD tahun 2008, pada tahun 2008, AMH di Kabupaten Sleman mencapai 93,81 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 91,49 persen⁴.

Dengan melihat data-data yang ada, dalam pandangan penulis, AMH Kabupaten Sleman pada tahun 2008 jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2007 dengan perbandingan dari 91,49 persen menjadi 93,81 persen.

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Bila dilihat dari data yang ada Angka Rata-Rata

⁴ LPPD Kabupaten Sleman Tahun 2008

Lama Sekolah di Kabupaten Sleman cukup tinggi, yaitu dengan rata-rata 10,10 tahun, sekalipun masih tetap berada di bawah Kota Yogyakarta dengan rata-rata selama 10,95 tahun. Sementara yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul dengan rata-rata selama 7,60 tahun, disusul Kulonprogo 7,80 tahun, dan Bantul 8,36 tahun. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di DIY 2007-2008

No	Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (TH)
1	Kulonprogo	7,80
2	Bantul	8,36
3	Gunungkidul	7,60
4	Sleman	10,10
5	Yogyakarta	10,95

Sumber: BPS DIY, DIY dalam Angka 2009

Maka dalam pandangan penulis, hal ini menjadi poin penting yang menjadi keberhasilan pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2008, sekalipun Angka Rata-Rata Lama Sekolah-nya masih berada di bawah Angka Rata-Rata Kota Yogyakarta. Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang mencapai 10,10 persen bisa tercapai mengingat banyaknya instansi pendidikan yang berada di Kabupaten Sleman, baik swasta maupun negeri dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

3) Angka Partisipasi Murni

Untuk mendapatkan presentase APM. Dilakukan penghitungan, jumlah penduduk usia antara 7-18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/ SLTP/ SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-18 tahun.

Berdasarkan LPPD 2008 APM Kabupaten Sleman, pada tahun 2008, untuk SD/MI mencapai 98,99 persen, SMP/ MTs mencapai 80,98 persen dan untuk SMA/SMK/ MA mencapai 53,87 persen. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Presentase Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Sleman, 2007-2008

Jenjang Pendidikan	2007	2008
SD	98,78	90,99
SLTP	80,77	80,98
SM	53,43	53,87

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Sleman 2007 dan 2008

4) Angka Pasrtisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SLTP/ SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-18 tahun. Berdasarkan LPPD 2008 angka partisipasi kasar di Kabupaten Sleman untuk tingkat SD/ MI tercapai 115,67 persen, SMP/ MTs tercapai 115,01 persen dan SMU/ SMK/ MA tercapai 75,45 persen. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Presentase Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Sleman, 2007, 2008

Jenjang Pendidikan	2007	2008
SD	115,34	115,67
SLTP	114,99	115,01
SM	75,04	75,45

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Sleman 2007 dan 2008

Tabel 3.6
Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Sleman, 2008

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki – laki	Perempuan
1. Tidak Punya Ijazah	13,19	22,69
2. SD/ MI	14,19	17,04
3. SLTP?MTs/ sederajat	16,39	14,90
4. SMU/MA/ sederajat	26,76	20,01
5. SM Kejuruan	15,86	11,98
6. Diploma I / II	1,47	1,27
7. Diploma III / Sarmud	3,01	3,91
8. D IV / SI	7,61	7,71
9. S2 / S3	0,94	0,50
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: BPS Sleman, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2008

Untuk Angka Pendidikan yang ditamatkan ini angka tertinggi adalah jenjang pendidikan SMU/ MA baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dimana untuk laki-laki mencapai 26,76 persen dan perempuan mencapai 20,01 persen. Sementara angka terendah adalah untuk jenjang pendidikan S2/ S3, dimana untuk laki-laki angkanya hanya 0,94 persen dan perempuan hanya 0,50 persen. Selain itu angka penduduk yang tidak memiliki Ijazah pun masihlah cukup tinggi dimana untuk laki-laki mencapai 13,19 dan untuk perempuan mencapai 22,69 persen.

Secara umum, dalam aspek pendidikan sebagai sub bagian dari indikator Kesejahteraan Sosial, yang dilihat dari AMH, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, APM, APK, dan Angka Pendidikan yang Ditamatkan. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2008, dalam hemat penulis

sangatlah baik dengan adanya peningkatan presentase angka bila dibandingkan dengan tahun 2007. Dimana misalkan AMH pada tahun 2008 sebesar 93,81 dari tahun 2007 yang hanya sebesar 91,49 persen. Angka Rata-rata Lama Sekolah menempati posisi kedua tertinggi di Provinsi DIY setelah Kota Yogyakarta dengan presentase sebesar 10,10 persen. Begitupun APM untuk tingkat SD meningkat sekalipun tidak signifikan, dari 115,34 persen pada tahun 2007 menjadi 115,67 persen pada tahun 2008, untuk SLTP dari 114,99 persen menjadi 115,01 persen, dan untuk SM dari 75,04 persen menjadi 75,45 persen.

Selain itu, berdasarkan LPPD Tahun 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengupayakan pemerataan pendidikan melalui aktivitas pendidikan non formal berupa kelompok belajar paket A fungsional (fokus pada ketrampilan) sebanyak 170 kelompok dengan jumlah warga belajar 1.700 orang, kelompok belajar paket A setara SD sebanyak 5 kelompok dengan warga belajar 100 orang, paket B setara SMP sebanyak 23 kelompok dengan warga belajar 460 orang, dan paket C setara SMA sebanyak 41 kelompok dengan warga belajar 810 orang⁵.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan juga dilakukan dengan peningkatan kapasitas guru. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan hal tersebut adalah pemberian bea siswa dan subsidi kepada 200 guru untuk menempuh pendidikan di UNY dan Universitas Terbuka, fasilitasi uji sertifikasi guru dari tingkat TK hingga SMA dan SMK sebanyak 1.023 orang, penilaian angka kredit 1.805 guru, pengembangan program bilingual bagi 364 guru, penyusunan model KTSP, pelatihan dan pengembangan KTSP bagi 276 guru,

⁵ LPPD Kabupaten Sleman Tahun 2008

akreditasi 117 sekolah dan pemantapan 150 orang calon asesor serta pemberian insentif GTT/ GTY dan PTT 6.797 orang.

Sekalipun angka penduduk yang tidak memiliki Ijazah cukup tinggi. Hal itu terjadi mungkin sebagai akibat dari karakter pendidikan di masa lalu. Dimana kebanyakan orang tua abai terhadap pendidikan, biasanya penduduk yang tidak memiliki Ijazah adalah mereka yang hidup di masa Penjajahan dan di masa orde lama. Sehingga tidak sepenuhnya dengan tingginya angka tersebut menjadi kesalahan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

b. Kesehatan

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi bisa dilihat dari Rata-Rata Angka Kematian Bayi dikurangi dengan jumlah keseluruhan Angka Kelahiran Bayi. Dalam LPPD 2008 dijelaskan bahwa Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup sebesar 5,81 persen, angka ini dibawah angka provinsi yang mencapai sebesar 19,92 persen dan angka nasional sebesar 26 persen. Dengan demikian dalam pandangan penulis, Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Sleman jauh lebih baik dibandingkan dengan angka provinsi dan nasional, dimana Angka Kematian Bayinya hanya sebesar 5,81 persen, sementara Provinsi DIY sebesar 19,92 persen, dan nasional cukup tinggi sebesar 26 persen.

2) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada pola mortalitas menurun umur. Berdasarkan DIY dalam Angka Tahun 2009, pada tahun 2008 Kabupaten

Sleman menempati posisi pertama presentase Angka Usia Harapan Hidup di antara kabupaten/ kota di Provinsi DIY. Dimana rata-ratanya adalah sebesar 74,10 tahun, disusul kemudian Kabupaten Kulonprogo dengan 73,47 tahun, Kota Yogyakarta 73,14 tahun, Kabupaten Bantul 70,96 tahun, dan Gunungkidul 70,75 tahun. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Angka Harapan Hidup Berdasarkan Kabupaten/ Kota di DIY 2007-2008

No	Kabupaten/ Kota	Rata-Rata (Tahun)
1	Kulonprogo	73,47
2	Bantul	70,96
3	Gunungkidul	70,75
4	Sleman	74,10
5	Yogyakarta	73,14

Sumber: BPS DIY, DIY dalam Angka 2009

3) Presentase Balita Gizi Buruk

Presentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Sleman, pada tahun 2008, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan presentase balita dalam status Gizi Kurang yang berkisar sekitar 10,38. Presentase tertinggi status balita di Kabupaten Sleman berstatus Gizi Baik yang mencapai 87,83. Sementara balita yang berstatus Gizi Lebih hanya mencapai 24 persen saja. Dengan demikian maka, tidak ada persoalan yang serius menyangkut jumlah Balita Gizi Buruk, sekalipun tetap sebesar apapun jumlahnya haruslah terus ditekan. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.8

Presentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Sleman, 2008

No	Status Balita	Presentase
1	Gizi Lebih	1,24
2	Gizi Baik	87,83
3	Gizi Kurang	10,38
4	Gizi Buruk	0,54

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman 2010

Maka secara umum dalam pandangan penulis aspek Kesehatan sebagai sub bagian dari Aspek Kesejahteraan Sosial, dilihat dari indikator-indikator yang ada, seperti Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, dan Presentase Balita Gizi Buruk bagi Kabupaten Sleman pada tahun 2008 jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2007 atau presentase angka provinsi dan nasional. Dimana Angka Kelangsungan Kematian Bayi lebih rendah dibandingkan dengan angka Provinsi DIY yang sebesar 19,92 persen dan nasional sebesar 26 persen, sementara untuk Kabupaten Sleman sendiri hanya sebesar 5,81 persen. Angka Usia Harapan Hidup menempati posisi paling tinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi DIY dengan rata-rata Usia Harapan Hidup 74,10 tahun. Dan untuk presentase Balita Gizi Buruk keadaannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keadaan balita Gizi Lebih 1,24 persen, Gizi Baik 87,83 persen, Gizi Kurang 10,38 persen, sementara Gizi Buruk hanya 0,54 persen saja.

Upaya meningkatkan kualitas masyarakat Sleman juga diselenggarakan melalui kebijakan setiap bayi yang lahir harus dalam keadaan sehat dan cerdas secara alami. Implikasinya pelayanan kesehatan harus diberikan sejak bayi dalam

kandungan. Kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sleman.⁶ Selain itu dalam ranah kebijakan lainnya pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki beberapa kebijakan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Diantaranya⁷:

- a) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemahaman, dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya, manusia lingkungan, prasarana dan sarana kesehatan
- c) Meningkatkan kualitas lembaga dan pelayanan kesehatan

Kebijakan tersebut diturunkan menjadi beberapa program sehingga bisa benar-benar dirasakan pelayanannya oleh masyarakat. Di antara program-programnya adalah:

- a) Prilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat
 - b) Perbaikan gizi
 - c) Upaya kesehatan
 - d) Pemberdayaan kader posyandu
- a) Penanganan gizi makro
 - b) Pengelolaan dan pelaksanaan imunisasi
 - c) Sosialisasi kesehatan reproduksi
 - d) Penanganan dan sosialisasi Napza
 - e) Dll

⁶ LPPD Kabupaten Sleman Tahun 2008

⁷ <http://www.docstoc.com/docs/22180100/Meningkatnya-derajat-kesehatan-masyarakat/2008>.
(Akses 29 Desember 2010)

Khusus dalam penanganan gizi buruk balita ada program yang dirancang sebagai upaya penyelesaiannya. Di antaranya:

- a) Pemberian informasi yang proporsional ke media massa tentang situasi dan kondisi gizi pada balita dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah
- b) Pelaksanaan penyelidikan *epidemiologi* oleh petugas puskesmas jika ada laporan gizi buruk dan tindak lanjut pelaksanaan kasus tersebut
- c) Pelaksanaan survei pemantauan status gizi pada seluruh balita di posyandu serentak di bulan pebruari
- d) Pemberian makanan tambahan susu bagi balita dan ibu hamil gakin

Dengan program-program yang ada itulah maka wajar bila pencapaian angka kesehatan di Kabupaten Sleman termasuk baik. Mengingat faktor utama yang mempengaruhi derajat sehat masyarakat adalah tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar di kabupaten sleman dan juga adanya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sarana kesehatan yang ada tersebut. Kemudian penulis akan mencoba menganalisisnya dengan menggunakan teori pengukuran kinerja seperti yang penulis paparkan di Kerangka Dasar Teori. Dimana menurut Dwiyanto pengukuran terhadap suatu kinerja bisa dilakukan melalui aspek produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Dilihat dari segi produktivitas, maka tentunya program-program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman bila dilihat dari angka pencapaiannya memang telah efektif, dan juga bila dilihat dari besaran

pencapaiannya telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalkan dalam targetannya Angka balita gizi buruk itu sebesar 0,732 persen, ternyata dalam realisasinya bisa mencapai 0,54 persen⁸. Lebih baik dari targetan yang ada. Dilihat dari kualitas layanan, pelayanan yang diberikan masyarakat sangat mudah dalam mengakses layanannya dengan keberadaan puskesmas yang tersebar di Kabupaten Sleman dan juga posyandu-posyandu. Dilihat dari responsivitas pun program yang ada direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengingat masyarakat di Kabupaten Sleman proaktif untuk mendapatkan layanan kesehatan⁹. Dengan adanya kebijakan yang kemudian diturunkan melalui program untuk direalisasikan di masyarakat maka secara sederhana apa yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi. Dan juga dilihat dari masuknya target pencapaian dalam dokumen RPJMD dan LPPD maka secara tidak langsung hal itu telah didialogkan di DPRD Kabupaten Sleman sebagai representasi dari perwakilan rakyat. Oleh karenanya secara responsibilitas, dan akuntabilitas bisa dipertanggung jawabkan.

c. Kemiskinan

Untuk persoalan Kemiskinan, berdasarkan Sleman dalam Angka Tahun 2009, jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Sleman adalah 255.555 KK. Keluarga yang miskin sebanyak 56.867 KK atau sekitar 22,25 persen dari jumlah keseluruhan KK di Kabupaten Sleman. Sementara KK yang tidak berada di bawah garis kemiskinan jumlahnya jauh lebih banyak yang

⁸ RPJMD Kabupaten Sleman 2010

⁹ <http://www.docstoc.com/docs/22180100/Meningkatnya-derajat-kesehatan-masyarakat>. (Akses 29 Desember 2010)

mencapai 201.688 atau sekitar 77,75 persen dari jumlah keseluruhan KK di Kabupaten Sleman.

Tabel 3.9

Presentase Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman, 2008

Banyaknya KK	KK Miskin	%	KK Tidak Miskin	%
255.555	56.867	22.25	201.688	77,75

Sumber: BPS DIY, Sleman dalam Angka 2008

Dengan demikian, dalam pandangan penulis, sekalipun jumlah KK yang tidak berada di bawah garis kemiskinan lebih banyak dibandingkan dengan KK yang berada di bawah garis kemiskinan, tetap saja tidak bisa diapresiasi, mengingat dengan jumlah 56.867 KK penduduk miskin masalah cukup tinggi, dengan presentase yang mencapai 22.25 persen. Angka kemiskinan begitu tinggi tidak terlepas dari rendahnya angka kesempatan kerja yang hanya mencapai 0,684 persen. Tentunya dengan angka yang demikian berimbang pada Angka Ketimpangan Kemakmuran 20 persen tertinggi yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2008 yang mencapai 46,99 persen.

Oleh karenanya, hal ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus berupaya menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja dari setiap angkatan kerja yang ada. Selain itu perlu adanya regulasi yang mengatur tentang kemudahan bagi penduduk miskin untuk melakukan kredit modal usaha terhadap Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY).

d. Kepemilikan Tanah

Terkait dengan kepemilikan tanah presentase penduduk yang memiliki tanah datanya tidaklah terdapat. Berdasarkan data LPPD 2008, penulis hanya menemukan penjelasan bahwa pada tahun 2008 telah diproses izin peruntukan penggunaan tanah sebanyak 864 buah, 394 buah disetujui atau 45,60 persen, 195 buah ditolak atau 22,57 persen dan 275 buah masih dalam proses atau 31,83 persen. Untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan telah diupayakan adanya kepastian status tanah melalui pendataan, pengukuran, dan pensertifikatan tanah kas desa. Sampai tahun 2008 jumlah tanah kas desa yang telah bersertifikat sebanyak 5.541 sertifikat dari 17.031 bidang atau meningkat 8,10 persen dari tahun 2007. Selain itu telah diterbitkan rekomendasi 39 rekomendasi izin pakai (*kekancingan*) tanah-tanah *Sultan Ground* dan pemberian rekomendasi permohonan izin Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa.

Selain itu untuk melihat kepemilikan tanah pun bisa dilihat dari aspek tanah yang bersertifikat di Kabupaten Sleman. Berdasarkan data yang penulis dapatkan tanah bersertifikat dalam kategori Hak Milik sebanyak 411.219 bidang dengan luas mencapai 250.082.394 m². Kemudian dalam kategori Hak Guna Bangunan jumlahnya mencapai 23.486 bidang dan luasnya mencapai 9.059.775 m². Dalam kategori Hak Pakai terdapat 8.593 bidang yang luasnya mencapai 19.538.196. Hak Pengelola sebanyak 32 bidang dengan luasnya mencapai 449.457 m². Dan tanah Wakaf sebanyak 778 bidang dengan luas mencapai 143.789 m²¹⁰.

¹⁰ LPPD Kabupaten Sleman Tahun 2008

e. Kesempatan Kerja

Terkait dengan persoalan Kesempatan Kerja di Kabupaten Sleman, berdasarkan Lampiran PP No. 6/ 2008, Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah penduduk laki-laki yang bekerja pada tahun 2008 mencapai 298.792, penduduk perempuan yang bekerja 229.193 orang, sementara angkatan kerja penduduk laki-laki berjumlah 320.817 dan perempuan 245.843 orang. Oleh karenanya Rasio Kesempatan Kerja penduduk laki-laki mencapai 0,93 persen dan perempuan 0,43 persen. Berikut ini adalah tabelnya:

Tabel 3.10

Beberapa Variabel Ketenaga Kerjaan di Kabupaten Sleman Menurut Jenis Klamim, Tahun 2008

Uraian	2008	
	Laki-laki	Perempuan
1. Penduduk Usia Kerja	416.113	411.916
2. Angkatan Kerja	320.817	245.843
- Bekerja	298.792	229.193
- Pengangguran Terbuka	22.024	16.650
3. Bukan Angkatan Kerja	95.296	166.073
4. Rasio Kesempatan Kerja %	0,93	0,43

Sumber: BPS Sleman, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2008

Sama dengan presentase angka-angka lainnya, yang terdapat perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan, dalam presentase Kesempatan Kerja pun penduduk laki-laki angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Padahal dilihat dari segi jumlah, Angkatan Kerja penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Angkatan Kerja perempuan.

Seharusnya yang memiliki dengan perbandingan jumlah Angkatan Kerja yang ada, maka yang lebih besar angka Kesempatan Kerjanya adalah penduduk perempuan. Hal ini bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan sebagai imbas dari bias jender yang masih berkembang di dalam tradisi masyarakat Jawa di Kabupaten Sleman. Dimana masyarakat Jawa masih menganggap bahwa kaum perempuan sebagai kelas kedua setelah kaum laki-laki, sehingga kesempatan kerja pun lebih banyak dimiliki oleh kaum laki-laki. Oleh karenanya hal ini harus menjadi catatan tersendiri bagi PEMDA Kabupaten Sleman dalam mengupayakan pemahaman kesetaraan jender terhadap masyarakat.

f. Kriminalitas

Terkait dengan aspek kriminalitas maka yang dilihat adalah angka kriminalitas di Kabupaten Sleman selama satu tahun. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, dari Sleman dalam Angka 2009, angka kriminalitas tertinggi adalah dalam jenis narkoba yang mencapai 52 laporan dan 62 kasus yang terselesaikan. Hal ini jauh bertolak belakang dengan angka kriminalitas tahun 2007, dimana kasus narkoba tidak ada sama-sekali. Disusul kemudian kebakaran dengan laporan sebanyak 23 kasus dan terselesaikan 22 kasus, hampir sama dengan yang terjadi di tahun 2007 dengan laporan 22 kasus dan terselesaikan 22 kasus. Kemudian kasus uang palsu yang terjadi hanya satu kali di bulan November dan terselesaikan di bulan Desember. Dan terakhir adalah kriminalitas pembunuhan, yang cukup signifikan perbaikannya dimana pada tahun 2008 tidak ada kasus pembunuhan, berbeda dengan tahun 2007 dimana pembunuhan terjadi 3 kali dalam setahun. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.11

**Banyaknya Tindak Kriminalitas menurut Jenisnya per Bulan
di Kabupaten Sleman, 2008**

Bulan	Kebakaran		Uang Palsu		Narkoba		Bunuh		Anirat	
	L ¹¹	S ¹²	L	S	L	S	L	S	L	S
Januari	2	2	0	0	4	13	0	0	0	0
Pebruari	1	1	0	0	7	11	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
April	2	1	0	0	5	8	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
Juni	3	3	0	0	5	10	0	0	0	0
Juli	2	2	0	0	0	9	0	0	0	0
Agustus	4	4	0	0	6	4	0	0	0	0
September	3	3	0	0	6	2	0	0	0	0
Oktober	2	2	0	0	1	3	0	0	0	0
November	1	1	1	0	2	5	0	0	0	0
Desember	3	3	0	1	5	2	0	0	0	0
Jumlah	23	22	1	1	52	62	0	0	0	0
Tahun 2007	22	22	1	0	0	0	3	3	0	0

Sumber: BPS DIY, Sleman dalam Angka 2009

Dengan demikian maka dalam pandangan penulis, dalam aspek kriminalitas ada beberapa tindakan kriminal yang meningkat tetapi ada juga yang berkurang. Untuk yang meningkat adalah tindakan kriminalitas dalam kasus narkoba dimana pada tahun 2007 sama sekali tidak ada kasusnya, sementara di tahun 2008 mencapai 52 laporan dan 62 kasus yang terselesaikan. Adapun yang berkurang adalah kasus bunuh diri dari tahun 2007 yang terjadi sebanyak 3 kasus, pada tahun 2008 sama sekali tidak terjadi kasus bunuh diri. Dan untuk kebakaran masih perlu pengawasan dari pemerintah Kabupaten Sleman, dimana jumlah

¹¹ L = Laporan

¹² S = Selesai

kasus kebakaran pada tahun 2008 mencapai 23 kasus, tahun 2007 22 kasus. Dengan angka yang demikian maka hal ini terhitung relative cukup tinggi.

Kasus narkoba begitu tinggi tentunya tidak bisa mempunyai hubungan yang erat dengan rendahnya angka kesempatan kerja dan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sleman. Angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menjadi pengangguran sangat rentan untuk melakukan penyimpangan narkoba. Selain itu sebagai kabupaten yang terdapat beberapa sekolah dan kampus besar baik negeri maupun swasta tentunya sangat rentan dengan kasus narkoba ini. Mengingat kebanyakan pengguna narkoba biasanya adalah dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Maka tentunya hal ini harus bisa diantisipasi oleh PEMDA dan Kepolisian Kabupaten Sleman dalam mengupayakan terbebasnya Kabupaten Sleman dari narkoba di tahun-tahun yang akan datang.

3. Seni Budaya dan Olahraga

a. Group Kesenian

Jumlah group kesenian yang berada di Kabupaten Sleman berdasarkan data Profil Sistem Informasi BAPPEDA 2007-2008 perkembangan jumlah group kesenian di Kabupaten Sleman dari tahun 2007-2008 ada yang mengalami perkembangan dan ada juga yang statis tidak berkembang. Seperti group Seni Musik yang mengalami perkembangan dari 392 pada tahun 2007, menjadi 793 group pada tahun 2008. Kemudian Seni Tari, dari 242 pada tahun 2007 menjadi 492 pada tahun 2008. Sementara yang statis adalah Seni Teater yang tetap 45

group, Seni Sastra 277 group, Drama Tari 12 group, dan Wayang 12 group.

Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.12

Jumlah Group Kesenian di Kabupaten Sleman dari Tahun 2007-2008

Jenis Kesenian	2007	2008	Keterangan
Seni Musik	392	793	Kelompok
Seni Tari	242	492	Kelompok
Seni Teater	45	45	Kelompok
Drama Tari	12	12	Kelompok
Seni Sastra	277	277	Kelompok
Wayang	12	12	Kelompok

Sumber: Profil Sistem Informasi BAPPEDA Kab. Sleman

Dalam pandangan penulis, Seni Musik mengalami perkembangan yang pesat dari tahun 2007-2008 merupakan hal yang wajar-wajar saja. Mengingat derasnya arus industri musik nasional. Begitupun dengan Seni Tari, sebagai tujuan wisata turis asing, wajar bila di Kabupaten Sleman mengalami perkembangan yang signifikan. Namun yang disayangkan adalah untuk kesenian Wayang yang dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan, padahal seni Wayang merupakan salah satu kesenian warisan budaya yang harus dipertahankan. Arus modernisasi dengan sejuta kemewahan yang disuguhkannya memang telah membuat kesenian-kesenian rakyat semakin terabaikan. Oleh karenanya, tentunya hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Sleman ke depannya.

b. Klub Olahraga

Untuk jumlah klub olahraga di Kabupaten Sleman, Sepak Bola sebanyak 84 klub, Bola Voli 84 klub, Bulu Tangkis 82 klub. Bertolak belakang dengan ketiga jenis olah raga tersebut, Bola Basket menempati posisi terakhir dan tidak merata ada di setiap kecamatan, hanya sebanyak 26 club. Klub Sepak Bola, Bola Voli, dan Bulu Tangkis terbanyak terdapat di Kecamatan Tempel, sementara klub Bulu Tangkis terbanyak terdapat di Kecamatan Ngaglik.

Sementara untuk jenis olahraga lainnya, Tenis Lapangan 43 klub, Renang 15 klub, Tenis Meja 74 klub, dan Bela Diri 34 club. Klub Tenis Lapangan terbanyak terdapat di Kecamatan Godean dengan jumlah 6 klub. Klub Renang keberadaan dan jumlahnya hampir merata ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman, rata-rata 1 dan 2 klub. Jumlah klub Tenis Meja terbanyak terdapat di Kecamatan Tempel, sebanyak 8 klub. Dan adapun jumlah klub Bela Diri terbanyak terdapat di Kecamatan Sleman dan Ngemplak, masing-masing sebanyak 4 klub. Untuk lebih jelasnya lihatlah taber 3.14 dan 3.15 berikut ini:

Tabel 3.13

Jumlah Klub Olahraga per Kecamatan di Kabupaten Sleman, 2008

Kecamatan	Jenis Kegiatan Olah Raga			
	Sepak Bola	Bola Voli	Bulu Tangkis	Bola Basket
Moyudan	4	4	4	1
Minggir	5	5	5	3
Seyegan	5	5	5	0
Godean	7	7	7	1
Gamping	5	5	5	1
Mlati	5	5	5	2
Depok	3	3	3	3
Berbah	4	4	4	0
Prambanan	6	6	5	1
Kalasan	4	4	4	1
Ngemplak	5	5	5	2
Ngaglik	6	6	6	6
Sleman	5	5	5	1
Tempel	8	8	8	2
Turi	4	3	4	0
Pakem	5	5	5	1
Cangkringan	3	4	2	1
Total	84	84	82	26

Sumber: BPS DIY, Statistik Potensi Desa 2008

Tabel 3.14

Jumlah Klub Olahraga per Kecamatan di Kabupaten Sleman, 2008

Kecamatan	Jenis Kegiatan Olah Raga			
	Tenis Lapangan	Renang	Tenis Meja	Bela Diri
Moyudan	3	1	3	2
Minggir	4	0	5	3
Seyegan	1	2	4	1
Godean	6	0	6	1
Gamping	4	2	5	3
Mlati	2	0	4	2
Depok	3	2	3	3
Berbah	0	0	4	0
Prambanan	2	0	5	3
Kalasan	4	0	4	1
Ngemplak	2	1	5	4
Ngaglik	4	2	6	3
Sleman	4	1	5	4
Tempel	2	2	8	2
Turi	0	0	3	0
Pakem	2	2	2	1
Cangkringan	0	0	2	1
Total	43	15	74	34

Sumber: BPS DIY, Statistik Potensi Desa 2008

Meratanya keberadaan klub olahraga hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Sleman tidak terlepas dari program Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengupayakan mutu dan kualitas olahraga di kabupaten Sleman. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berupaya menumbuhkan jiwa sportifitas

dengan melakukan pembinaan klub olahraga pelajar kecamatan cabang sepakbola di 6 kecamatan, bola voli 6 kecamatan, dan tenis meja di 5 kecamatan, Pelatihan terhadap 60 pelatih bulu tangkis dan 60 wasit tenis meja, dan Pelatihan terhadap 100 instruktur senam untuk guru olahraga SMP/ MTs/ SMA/ SMK/ MA serta memfasilitasi penyelenggaraan lomba di semua cabang olahraga¹³.

c. Gedung Olahraga

Jumlah gedung olah raga di Kabupaten Sleman terhitung sangatlah banyak, dimana untuk lapangan Sepak Bola terdapat sebanyak 83 lapangan. Bola Voli sebanyak 84 lapangan. Bulu Tangkis 83 lapangan. Bola Basket 27 lapangan. Tenis lapangan 36 lapangan. Dan kolam renang 18 kolam. Lapangan sepak bola terbanyak terdapat di Kecamatan Tempel, begitupun untuk lapangan voli dan lapangan bulu tangkis, terdapat di Kecamatan Tempel dengan jumlah masing-masing 8 buah. Sementara lapangan bola basket terbanyak terdapat di Kecamatan Ngaglik sebanyak 6 buah. Adapun lapangan tenis terbanyak terdapat di Kecamatan Ngaglik dan Gamping masing-masing 4 buah. Dan terakhir kolam renang terbanyak di Kecamatan Godean dan Pekem. Lihatlah tabel 3.16 berikut ini:

¹³ LPPD Kabupaten Sleman Tahun 2008

Tabel 3.15
Jumlah Gedung/ Lapangan Olahraga per Kecamatan
di Kabupaten Sleman, 2008

Kecamatan	Sepak Bola	Bola Voli	Bulu Tangkis	Bola Basket	Tenis Lapangan	Renang
Moyudan	4	4	4	1	2	0
Minggir	5	5	5	3	3	0
Seyegan	4	4	4	0	1	2
Godean	7	7	7	1	2	3
Gamping	5	5	5	1	4	2
Mlati	5	5	5	2	2	0
Depok	3	3	3	3	3	2
Berbah	4	4	4	0	2	1
Prambanan	5	5	5	2	2	1
Kalasan	4	4	4	0	2	1
Ngemplak	5	5	5	2	2	1
Ngaglik	6	6	6	6	4	2
Sleman	5	5	5	1	2	3
Tempel	8	8	8	2	2	1
Turi	4	4	4	2	1	0
Pakem	5	5	5	1	2	3
Cangkringan	4	5	4	1	0	0
Total	83	84	83	27	36	18

Sumber: BPS DIY, Statistik Potensi Desa 2008

Maka dari aspek Seni Budaya dan Olahraga yang terdiri dari Jumlah Group Kesenian, Klub Olahraga, Gedung Olahraga dalam pandangan penulis, dalam aspek Group Kesenian ada yang mengalami perkembangan jumlah groupnya dan ada yang statis. Yang mengalami perkembangan adalah group Seni Musik dari 392 group pada tahun 2007 menjadi 392 pada tahun 2008. Yang

perkembangannya cukup pesat adalah Seni Tari dari 242 group pada tahun 2007 menjadi 492 group pada tahun 2008. Sementara dalam aspek seni lainnya seperti seni Tetaer, Sastra, Wayang, dan Drama tetap statis. Dengan data yang demikian, maka Pemerintah Kabupaten Sleman perlu untuk mendapatkan apresiasi, namun di sisi lain perlu untuk diberikan catatan, dimana untuk kesenian Wayang perlu mendapatkan perhatian supaya kesenian ini tidak punah, mengingat kesenian Wayang merupakan kesenian rakyat warisan dari tradisi masa lalu. Begitupun dengan seni Sastra—tentunya seni Sastra yang dimaksud adalah Sastra Jawa—perlu juga mendapatkan perhatian, seperti misalkan dengan membuka palatihan-pelatihan kesenian untuk generasi muda kasus untuk kedua jenis seni tersebut.

Dalam aspek Olahraga, jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Sleman hampir merata ada di setiap kecamatan, kecuali untuk olahraga Basket. Hal ini bisa dimaklumi mengingat belum populernya olahraga Basket di Indonesia. Untuk Gedung Olahraga keberadaannya hampir merata ada di setiap kecamatan di Kabupaten Sleman. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengupayakan sportifitas dan peningkatan mutu olahraga.

B. Aspek Pelayanan Umum

1. Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) Pendidikan Dasar

a) Angka Partisipasi Sekolah

Terkait dengan angka partisipasi sekolah, penulis akan menyajikan terlebih dahulu data Jumlah Murid Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Sleman pada tahun 2008. Kemudian penulis akan mengolahnya untuk mendapatkan presentase Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan rumusan sesuai dalam Lampiran UU No. 6 tahun 2008. Untuk Jumlah Murid Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Sleman, tahun 2008, lihatlah tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3.16

Jumlah Murid Pendidikan Dasar Negeri/ Swasta Tahun 2008

No	Sekolah	Jumlah Murid
1	Negeri	64.710
2	Swasta	19.723
Total		84.430

Sumber: BPS DIY, Sleman dalam Angka 2009

Berdasarkan data di atas dapatlah dilihat bahwa, murid Sekolah Dasar Negeri jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah murid Sekolah Dasar Swasta. Dimana murid Sekolah Dasar Negeri jumlahnya adalah sebanyak 64.710, sementara murid Sekolah Dasar Swasta jumlahnya adalah sebanyak 19.723. Total keseluruhan murid Sekolah Dasar Negeri dan Swasta adalah sebanyak 84.430 murid. Berdasarkan Lampiran PP No. 6/ 2008, Angka Partisipasi

Sekolah adalah Jumlah Murid Pendidikan Dasar dibagi Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar, kali 1000. Maka hasilnya adalah sebagai berikut: $84.430 / 81.136 = 10,40$ persen. Jadi presentase Angka Partisipasi Sekolah untuk Pendidikan Dasar di Kabupaten Sleman, pada tahun 2008 adalah sebesar 10,40 persen.

b) Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah adalah jumlah Sekolah Pendidikan Dasar per Jumlah Usia Pendidikan Dasar, kali 10.000. Terlebih dahulu penulis akan memperlihatkan data Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta tahun 2008 di Kabupaten Sleman. Lihatlah tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3.17

Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta, 2008

No	Urian	Jumlah Sekolah
1	Negeri	328
2	Swasta	117
Total		445

Sumber: BPS DIY, Sleman dalam Angka 2009

Dari tabel di atas, Sekolah Dasar Negeri jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Sekolah Dasar Swasta. Dimana Sekolah Dasar Negeri jumlahnya adalah sebanyak 328 unit sekolah. Sementara Sekolah Dasar Swasta jumlahnya sebanyak 117 unit sekolah. Total keseluruhan jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Sleman, pada tahun 2008 adalah sebanyak 445 sekolah. Jumlah Usia Pendidikan Dasar berdasarkan Sleman dalam Angka 2008 adalah sebanyak 81.136 anak. Maka Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk

Usia Sekolah adalah sebagai berikut: $445 / 81.136 \times 10.000 = 54,846$ persen. Jadi Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sebesar 54,846 persen.

c) Rasio Guru/ Murid

Untuk Rasio Guru per Murid berdasarkan lampiran PP No.6 tahun 2008 adalah dengan cara menghitung Jumlah Guru Pendidikan Dasar dibagi dengan Jumlah Murid Pendidikan Dasar, kali 1000. Jumlah Guru Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta tahun 2008 di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tebel 3.18

Jumlah Guru Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta, 2008

No	Uraian	Jumlah Guru
1	Negeri	4.177
2	Swasta	1.461
Total		5.638

Sumber: BPS DIY, Sleman dalam Angka 2009

Berdasarkan data di atas dapatlah dilihat bahwa, Jumlah Guru Sekolah Dasar Negeri jauh lebih banyak dibandingkan dengan Jumlah Guru Sekolah Dasar Swasta. Dimana jumlah guru Sekolah Dasar Negeri adalah sebanyak 4.177 orang, sementara jumlah guru Sekolah Dasar Swasta adalah sebanyak 1.462 orang. Total keseluruhan guru Sekolah Dasar Negeri dan Swasta adalah sebanyak 5.638 orang. Jumlah Murid Pendidikan Dasar di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 berdasarkan Sleman dalam Angka 2009 adalah sebanyak 84.430 murid. Maka hasilnya adalah $5.638 / 84.430 \times 1000 = 66,77$. Jadi Rasio Guru per Murid di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 adalah sebesar 66,77 persen.

d) Rasio Guru/ Murid/ per Kelas Rata-rata

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, Rasio Guru per Murid per Rata-rata Kelas di Kabupaten Sleman, dari tahun ke tahun terus berdinamika, terkadang mengalami kenaikan dan terkadang juga mengalami penurunan. Untuk Sekolah Dasar Negeri, pada tahun ajaran 2006-2007 berkisar sekitar 15,62, mengalami penurunan pada tahun ajaran 2007-2008 menjadi 14,66. Dan kembali mengalami kenaikan menjadi 15,49 pada tahun ajaran 2008-2009. Sementara untuk Sekolah Dasar Swasta terus mengalami penurunan, dari 13,92 pada tahun ajaran 2006-2007, menjadi 13,53 pada tahun ajaran 2007-2008 dan mengalami penurunan kembali pada tahun ajaran 2008-2009 menjadi 13,50 persen. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel 3.20 berikut ini:

Tabel 3.19

Rasio Guru/ Murid/ Kelas Rata-Rata 2006-2009

Tahun Ajaran	SD Negeri	SD Swasta
2006-2007	15,62	13,92
2007-2008	14,66	13,53
2008-2009	15,49	13,50

Sumber: BPS DIY, Sleman dalam Angka 2009

Dalam pandangan penulis, terjadi kesenjangan antara presentase Sekolah Dasar Negeri dengan Sekolah Dasar Swasta, dimana untuk Sekolah Dasar Negeri kondisi tahun ajaran 2008-2009 lebih baik bila dibandingkan dengan tahun ajaran 2007-2008. Sementara untuk Sekolah Dasar Swasta presentasenya terus mengalami penurunan, kondisi tahun ajaran 2008-2009 lebih rendah dibandingkan dengan tahun ajaran 2007-2008. Oleh karenanya mesti ada upaya dari pemerintah

untuk menjembatani kesenjangan yang ada, supaya angka presentase Sekolah Dasar Swasta sebanding dengan presentase Sekolah Dasar Negri.

2) Pendidikan Menengah (Jenjang SLTP dan SMA)

a) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah adalah Jumlah Murid Pendidikan Menengah dibagi Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Menengah, kali 1000. Terlebih penulis akan menyajikan data Jumlah Murid Pendidikan Menengah Negri dan Swasta di Kabupaten Sleman pada tahun 2008. Lihatlah tabel 3.21 berikut ini:

Tabel 3.20

Jumlah Murid Pendidikan Menengah Negri dan Swasta, 2008

No	Sekolah	Jumlah Murid
1	Negri	7.792
2	Swasta	3.884
Total		11.679

Sumber: BPS DIY, Sleman dalam Angka 2009

Berdasarkan tabel di atas, jumlah murid Pendidikan Menengah Sekolah Negri jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah murid Sekolah Swasta. Dimana jumlah murid Sekolah Negri sebanyak 7.792 siswa, sementara jumlah murid Sekolah Swasta sebanyak 3.884 siswa. Maka total keseluruhan murid Pendidikan Menengah Negri dan Swasta di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 adalah sebanyak 11.679 siswa. Dan adapun jumlah Usia Pendidikan Menengah berdasarkan Sleman dalam Angka 2009 adalah sebanyak 40.411 orang. Maka Angka Partisipasi Sekolahnya adalah sebagai berikut: $11.679 / 40.411 \times 1000 = 28$,

9 persen. Jadi Angka Partisipasi Sekolah untuk Pendidikan Menengah di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 adalah sebesar 28,9 persen.

b) Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah per Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Menengah, kali 10.000. terlebih dahulu penulis akan menyajikan data Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Negri dan Swasta tahun 2008 di Kabupaten Sleman. Lihatlah tabel 3.22 berikut ini:

Tebel 3.21

Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Negri dan Swasta, 2008

No	Uraian	Jumlah Sekolah
1	Negri	17
2	Swasta	37
Total		54

Sumber: BPS DIY, Sleman dalam Angka 2009

Dari data di atas dapatlah dilihat bahwa jumlah Sekolah Swasta jauh lebih banyak dibandingkan dengan Sekolah Negri. Dimana jumlah Sekolah Negri sebanyak 17 sekolah, sementara Sekolah Swasta sebanyak 37 sekolah. Total keseluruhan Sekolah Pendidikan Menengah Negri dan Swasta di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 adalah sebanyak 54 sekolah. Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Menengah adalah sebanyak 40.411 orang. Maka Rasio Ketersediaan sekolah sebagai berikut: $54 / 40.411 \times 10.000 = 13,36$ persen. Jadi asio Ketersediaan Sekolah untuk Pendidikan Menengah pada tahun 2008 di Kabupaten Sleman adalah sebesar 13,36 persen.

c) Rasio Guru terhadap Murid

Untuk Rasio Guru per Murid berdasarkan lampiran PP No.6 tahun 2008 adalah Jumlah Guru Pendidikan Menengah per Jumlah Murid Pendidikan Menengah, kali 1000. Terkait dengan Jumlah Guru Pendidikan Menengah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.22
Jumlah Guru Pendidikan Menengah Negeri dan Swasta, 2008

No	Uraian Sekolah	Jumlah Guru
1	Negeri	747
2	Swasta	699
Total		1.446

Sumber: BPS DIY, Sleman dalam Angka 2009

Berdasarkan data di atas, untuk Pendidikan Menengah, guru Sekolah Negeri jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Guru Sekolah Swasta. Dimana guru Sekolah Menengah Negeri adalah sebanyak 747 orang, sementara guru Sekolah Swasta sebanyak 699 orang. Total keseluruhan guru Pendidikan Menengah Negeri dan Swasta adalah sebanyak 1.446 orang. Jumlah Murid Pendidikan Menengah adalah sebanyak 11.679. Maka Rasio Guru terhadap Muridnya adalah $1.446 / 11.679 \times 1000 = 123.81$. Jadi Rasio Guru per Murid pada tahun 2008 di Kabupaten Sleman adalah sebesar 12,38 persen.

d) Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata

Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata untuk setiap tahun ajarannya di Sekolah Negeri terus mengalami penurunan angka, dari 11,12 tahun ajaran 2006-2007 menjadi 10,75 pada tahun ajaran 2007-2008. Dan menjadi 10,43

pada tahun ajaran 2008-2009. Sementara di Sekolah Swasta terjadi dinamika, dimana pada tahun ajaran 2006-2007 sebesar 5,39 menjadi 5,79 pada tahun ajaran 2007-2008, dan kembali mengalami penurunan pada tahun ajaran 2008-2009 menjadi 5,56 persen. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel 3.24 berikut ini:

Tabel 3.23

Rasio Guru/ Murid/ Kelas Rata-Rata, 2006-2009

Tahun Ajaran	Negri	Swasta
2006-2007	11,12	5,39
2007-2008	10,75	5,79
2008-2009	10,43	5,56

Sumber: BPS DIY, Sleman dalam Angka 2009

Dengan melihat data di atas, dalam pandangan penulis terjadi kesenjangan yang begitu mencolok antara kualitas Sekolah Negri dengan Sekolah Swasta dilihat dari Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata. Kesenjangan itu terjadi sebagai bentuk ketidak seriusan sekolah-sekolah swasta dalam mengupayan kualitas dan mutu pendidikannya. Atau bisa juga terjadi karena adanya marginalisasi dalam bantuan penyaluran dana dari pemerintah. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di jenjangan pendidikan Sekolah Dasar. Maka oleh karena demikian, mesti ada penanganan yang serius untuk peningkatan mutu pendidikan Sekolah Swasta, supaya kualitasnya tidak tertinggal jauh oleh Sekolah Negri, mengingat banyaknya murid yang bersekolah di Sekolah Swasta.

b. Kesehatan

1) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio Posyandu per Satuan Balita adalah jumlah posyandu per jumlah balita, kali 1000. Terlebih dahulu penulis akan menyajikan data jumlah posyandu per kecamatan di Kabupaten Sleman pada tahun 2008. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.24

Jumlah Posyandu dan Tempat Praktek Bidan per Kecamatan, 2008

Kecamatan	Tempat Praktek Bidan	Jumlah Posyandu
Moyudan	4	4
Minggir	4	5
Seyegan	2	5
Godean	5	7
Gamping	4	5
Mlati	5	5
Depok	3	3
Berbah	4	4
Prambanan	2	6
Kalasan	4	4
Ngemplak	5	5
Ngaglik	6	6
Sleman	5	5
Tempel	8	8
Turi	4	4
Pakem	5	5
Cangkringan	3	5
Total	73	86

Sumber: BPS DIY, Statistik Potensi Desa Kabupaten Sleman 2008

Berdasarkan data Statistik Potensi Desa Kabupaten Sleman di atas, jumlah keseluruhan posyandu di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 86 tempat. Sementara tempat praktek bidan di Kabupaten Sleman sebanyak 73 tempat. Posyandu terbanyak terdapat di Kecamatan Tempel sebanyak 8 tempat, sementara

yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Depok. Jumlah balita di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 adalah sebanyak 2.495 balita. Maka Rasio Posyandu per Satuan Balitanya adalah sebagai berikut: $86 / 2.495 \times 1000 = 34,47$ persen. Jadi Rasio Posyandu per Satuan Balita pada tahun 2008 di Kabupaten Sleman adalah sebesar 34,47 persen.

2) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk dan Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Terkait dengan Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk, maka perhitungannya berdasarkan lampiran PP. No.6 tahun 2008 adalah Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu, per Jumlah Penduduk, kali 1000. Terlebih dahulu penulis akan menyajikan data jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Kabupaten Sleman pada tahun 2008. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.25

Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu, 2008

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Pustu
Moyudan	1	2	2	4
Minggir	1	1	0	3
Seyegan	1	1	0	4
Godean	0	2	0	5
Gamping	0	2	3	4
Mlati	1	2	2	3
Depok	3	2	3	3
Berbah	1	1	1	4
Prambanan	0	1	1	5
Kalasan	2	1	1	1
Ngemplak	2	2	3	3
Ngaglik	1	2	2	3
Sleman	1	1	3	4
Tempel	0	2	0	7
Turi	0	1	0	3
Pakem	1	1	3	4
Cangkringan	0	1	0	4
Total	15	25	24	54

Sumber: BPS DIY, Statistik Potensi Desa Kab. Sleman 2008

Berdasarkan data di atas, di Kabupaten Sleman terdapat Rumah Sakit sebanyak 15 unit, Puskesmas sebanyak 25 unit, Poliklinik sebanyak 24 unit, dan Pustu sebanyak 54. Rumah Sakit terbanyak terdapat di Kecamatan Depok sebanyak 3 rumah unit, sementara keberadaan Puskesmas hampir merata, rata-rata setiap kecamatan memiliki 1 atau 2 puskesmas. Keberadaan Poliklinik tidak merata, masih terdapat kecamatan yang tidak memiliki poliklinik sama-sekali. Adapun keberadaan Pustu terbanyak terdapat di Kecamatan Prambanan dan Godean dengan jumlahnya masing-masing sebanyak 5 unit. Jumlah penduduk Sleman pada tahun 2008 adalah sebanyak 1.040.220. Maka Rasionya adalah sebagai berikut: $25 + 24 + 54 = 103 / 1.040.220 \times 1000 = 0.009$. Sementara terkait

dengan Rasio Rumah Sakit adalah: jumlah rumah sakit per jumlah penduduk, kali 10.000. Maka hasilnya adalah sebagai berikut: $15 / 1.040.220 \times 10.000 = 0,14$ persen. Jadi Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 adalah sebesar 0,009 persen. Sementara Rasio Rumah Sakit per Satuan penduduk adalah sebesar 0,14 persen.

3) Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk berdasarkan Lampiran PP No. 6 tahun 2008 adalah Jumlah Keseluruhan Dokter dan Tenaga Medis dibagi Jumlah Penduduk, kali 1000. Berdasarkan DIY dalam Angka Tahun 2009, jumlah keseluruhan Dokter Umum yang berada di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 171, Dokter Gigi sebanyak 57, dan Dokter Spesialis sebanyak 136. Total keseluruhan Dokter (Tenaga Medis) adalah sebanyak 364. Sebagai perbandingan Jumlah Tenaga Medis di Provinsi DIY, lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.26
Jumlah Tenaga Medis per Kabupaten di DIY 2008

Kabupaten/ Kota	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Specialis	Jumlah/ Total
Kulonprogo	105	35	47	187
Bantul	102	63	22	187
Gunungkidul	66	26	12	104
Sleman	171	57	136	364
Yogyakarta	911	38	481	1.430
Total	1355	381	698	2272

Sumber: BPS DIY, DIY dalam Angka 2009

Berdasarkan data di atas, Tenaga Medis terbanyak terdapat di Kota Yogyakarta yang mencapai 1.430 tenaga medis. Disusul kemudian oleh Kabupaten Sleman yang terdapat sebanyak 364 tenaga medis. Disusul kemudian Kabupaten Kulonprogo dan Bantul yang sama-sama memiliki 187 tenaga medis. Adapun Gunungkidul memiliki 147 tenaga medis. Dan seperti yang telah penulis jelaskan, di Kabupaten Sleman sendiri terdapat 364 tenaga medis. Jumlah penduduk Sleman adalah sebanyak 1.040.220 orang. Maka Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduknya adalah sebagai berikut: $364 / 1.040.220 \times 1000 = 0,35$ persen. Jadi Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 adalah sebesar 0,35 persen.

c. Lingkungan Hidup

1) Presentase Penanganan Sampah

Terkait dengan presentase penanganan sampah, maka berdasarkan data yang penulis dapatkan, penanganan sampah dilakukan dengan tiga cara, yaitu; Ditimbun/ Dibakar, diangkut petugas TPA, dan Didaur Ulang/ Komposing. Maka untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.27
Presentase Penanganan Sampah 2006-2008 (m3/ hari)
Di Kabupaten Sleman Tahun 2008

Penanganan	2005	2006	2007	2008
Ditimbun/ Dibakar	1,970	1,992	2,052.70	1,945.60
Diangkut Petugas TPA	266	270	257.69	315.00
Didaur Ulang/ Komposing	16	16	16	16.60

Sumber: Profil Informasi Pemerintahan BAPPEDA Kab. Sleman

Berdasarkan data di atas, Presentase m³/ Hari Penanganan Sampah di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dari 1,970 m³/hari pada tahun 2005 menjadi 1,992 m³/ hari tahun 2006, pada tahun 2007 menjadi 2,050.70 m³/ hari dan berkurang kembali pada tahun 2008 menjadi 1,945.60 m³/ hari. Sementara yang Diangkut petugas TPA pada tahun 2005 mencapai 266 m³/ hari, menjadi 270 m³/hari pada tahun 2006. Pada tahun 2007 sebesar 2,052.70 m³/hari menjadi 315.00 m³/ hari pada tahun 2008. Dan adapun untuk yang Didaur Ulang/ Komposing dari tahun 2005-2007 tidak mengalami perubahan hanya sebesar 16 m³/hari, barulah pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 16.60 m³/ hari.

Dengan demikian, maka dalam pandangan penulis, untuk Penanganan Sampah yang Ditimbun/ Dibakar pada tahun 2008 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2007. Sementara untuk penanganan dengan Diangkut Petugas TPA dan Didaur Ulang/ Komposing pada tahun 2008 jumlahnya meningkat dibandingkan dengan tahun 2007. Didaur Ulang memang memerlukan kesabaran dan ketelitian, tidak mudah untuk menjadi sesuatu yang terbiasakan dalam kebiasaan masyarakat. Oleh karenanya hal ini bisa dikatakan dalam penanganan tahun 2008 jauh lebih dibandingkan dengan tahun 2007. Maka kemestian bagi PEMDA Kabupaten Sleman untuk terus mensosialisasikan Daur Ulang dalam penanganan sampah terhadap masyarakat.

2) Presentase Penduduk Berkases Air Minum

Dalam Lampiran PP No. 6 tahun 2008, untuk melihat penduduk Berakses Air Minum, maka dilakukan penghitungan dengan cara melihat total keseluruhan penduduk yang berkases air minum, dibagi jumlah penduduk, kali 100. Karena

data yang tersedia mencantumkan Rumah Tangga (RT) yang berakses air minum, maka penulis akan menghitungnya dengan melakukan penghitungan total keseluruhan RT yang berakses air minum, dibagi total jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Sleman, kali 100. Berdasarkan Data Informasi Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Sleman total RT yang berakses air minum pada tahun 2008 sebanyak 18.314 RT. Adapun pada tahun 2008 total keseluruhan RT di Kabupaten Sleman sebanyak 255.557, maka perhitungannya adalah sebagai berikut: $18.314 / 255.557 \times 100 = 7,167$ persen. Jadi Presentase Penduduk Berakses Air Minum pada tahun 2008 adalah sebesar 7,167 persen.

d. Sarana dan Prasarana Umum

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Berdasarkan data LPPD 2008, dari jalan kabupaten sepanjang 1.085 km yang terkategori baik sepanjang 314,33 km atau 28,9 persen.

2) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk adalah Jumlah Tempat Ibadah yang berda di Kabupaten Sleman per Jumlah Penduduk, kali 1000. Terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran jumlah Tempat Ibadah yang berada di Kabupaten Sleman. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.28

Banyaknya Tempat Ibadah per Kecamatan, 2008

Kecamatan	Jenis Tempat Ibadah					
	Masjid	Suarau	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Kelenteng
Moyudan	87	64	3	2	0	0
Minggir	95	59	3	2	0	0
Seyegan	90	75	1	1	1	0
Godean	110	81	2	0	0	0
Gamping	129	95	4	1	0	0
Mlati	122	81	5	7	0	2
Depok	159	117	13	1	0	0
Berbah	85	72	4	1	1	1
Prambanan	122	68	1	2	2	0
Kalasan	130	95	4	1	1	0
Ngemplak	115	141	2	1	1	0
Ngaglik	156	121	3	2	0	0
Sleman	119	67	3	4	0	0
Tempel	109	134	3	2	0	0
Turi	108	56	0	1	0	0
Pakem	94	39	4	3	0	0
Cangkringan	96	62	3	1	0	0
Total	1.926	1.433	58	32	6	3

Sumber: BPS DIY, Statistik Potensi Desa 2008

Berdasarkan data Statistik Potensi Desa Tahun 2008 di atas, jumlah Mesjid yang ada di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 1.926 dan Surau sebanyak 1.433. Sementara Gereja Kristen terdapat sebanyak 58 unit dan Gereja Katolik sebanyak 32 unit. Adapun Pura sebanyak 6 unit dan Kelenteng sebanyak 3 unit. Mesjid terbanyak terdapat di Kecamatan Depok sebanyak 159, dan Surau terbanyak terdapat di Kecamatan Ngemplak. Gereja Kristen terbanyak terdapat di Kecamatan Depok, dan Gereja Katolik terbanyak terdapat di Kecamatan Sleman.

Adapun Pura terbanyak terdapat di Kecamatan Prambanan dan Kelenteng terbanyak terdapat di Kecamatan Mlati. Total keseluruhan Tempat Ibadah di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 3458 unit. Maka Rasionya adalah sebagai berikut: $3458 / 1.040.220 \times 1000 = 3,33$ persen. Jadi Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 adalah sebesar 3,33 persen.

3) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Rasio TPS per Satuan Penduduk adalah jumlah keseluruhan TPS yang berada di Kabupaten Sleman per Jumlah Penduduk, kali 1000. Berdasarkan Statistik Potensi Desa DIY Tahun 2008 ada tiga jenis tempat pembuangan sampah, yaitu; Tempat Penampungan Sampah Sementara, Lobang Pembakaran, Selain dari keduanya, dan Penampungan Sampah Sementara. Di Kabupaten Kulonprogo Tempat Penampungan Sampah Sementara terdapat 1 tempat, Lobang Pembakaran 81, Lainnya 6, dan Penampungan Sampah sementara 5 tempat. Di Kabupaten Bantul total dari keempat jenis pembuangan sampah yang ada terdapat sebanyak 100 tempat. Sementara di Gunungkidul terdapat sebanyak 158 tempat dan di Kota Yogyakarta terdapat sebanyak 87. Dan adapun untuk Kabupaten Sleman sendiri terdapat sebanyak 101 tempat. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3. 29

Banyaknya Tempat Pembuangan Sampah dan Tempat Penampungan
Sampah Sementara di DIY, 2008

Kabupaten/ Kota	Jenis Tempat Pembuangan Sampah				Penampungan Sampah Sementara
	Tempat Sampah Kemudian Diangkut	Dalam Lobang/ Dibakar	Sungai	Lainnya	
Kulonprogo	1	81	-	6	5
Bantul	1	74	-	-	25
Gunungkidul	2	142	-	-	14
Sleman	7	76	-	3	15
Yogyakarta	45	-	-	-	42
Total	56	373	-	9	101

Sumber: BPS DIY, Statistik Potensi Desa DIY 2008

Dengan demikian maka Rasio Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk adalah sebagai berikut: $101 / 1.040.220 \times 1000 = 0,10$ persen. Jadi Rasionya pada tahun 2008 di Kabupaten Sleman adalah sebesar 0,10 persen.

e. Perhubungan

1) Jumlah Uji kir Angkutan Umum

Pada tahun 2008 jumlah Angkutan Umum yang wajib uji kir di Kabupaten Sleman Berdasarkan Sleman dalam Angka Tahun 2008 adalah Otobus sebanyak 404 unit, Bus sebanyak 856 unit, dan Truk sebanyak 7 unit. Total keseluruhan kendaraan umum yang wajib melakukan uji kir adalah sebanyak 1.267 unit kendaraan.

2) Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis

Di Kabupaten Sleman sama-sekali tidak terdapat pelabuhan laut, mengingat Kabupaten Sleman tidak memiliki wilayah yang berbatasan dengan lautan. Sementara mengenai udara, di Kabupaten Sleman terdapat satu bandara yaitu bandara Adisucipto. Bandara Adisucipto merupakan bandara internasional sebagai tulang punggung jalur penerbangan yang menghubungkan antara Provinsi DIY dengan kota-kota besar di Indonesia dan kota-kota di Asia.

Berdasarkan data dari BPS melalui Provinsi DIY dalam Angka tahun 2009. Pada tahun 2008 di Kabupaten Sleman terdapat empat terminal bus. *Pertama*, terminal bus Jombor dengan luas 7.800 m², dengan kapasitas 250 kendaraan. *Kedua*, terminal pekem dengan luas 2.240 m² dengan kapasitas 50 kendaraan. *Ketiga*, terminal Condongcatur dengan luas 3.397 m² dan kapasitas 70 unit kendaraan. *Keempat*, terminal Prambanan dengan luas 875 m² dan kapasitas 30 unit kendaraan.

Secara keseluruhan dalam aspek Pelayanan Dasar ini yang terdiri dari aspek Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Sarana dan Prasarana Umum, dan Perhubungan. Dalam aspek Pendidikan, untuk Pendidikan Dasar, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 cukuplah tinggi yaitu mencapai 10,40 persen. Rasio Ketersediaan Sekolah mencapai 54,848 persen. Rasio Guru/ Murid mencapai 66,77 persen. Rasio Guru/ Murid/ Per Kelas Rata-rata meningkat dari 2006-2007 hanya 13,53 persen menjadi 15,49 persen pada tahun 2008.

Untuk Pendidikan Menengah APS-nya lebih tinggi dibandingkan dengan APS Pendidikan Dasar yang mencapai 28,9 persen. Untuk Rasio Ketersediaan Sekolah lebih rendah dibandingkan dengan Pendidikan Dasar, hanya sebesar 13,36 persen. Rasio Guru terhadap Murid lebih rendah dibandingkan dengan Pendidikan Dasar, hanya mencapai 12,38 persen saja. Dan untuk Rasio Guru terhadap Murid sama lebih rendah dibandingkan Pendidikan Dasar, hanya sebesar 5,56 persen, mengalami penurunan dari tahun 2007 yang mencapai 5,79 persen.

Rasio Posyandu terhadap Satuan Balita sebesar 34,47 persen, dengan keadaan Posyandu yang hampir merata terdapat di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, maka hal itu akan memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Rumah Sakit per Satuan Penduduk masihlah cukup rendah yaitu hanya mencapai 0,14 persen saja. Dan untuk Rasio Dokter dan Tenaga Medis terhadap Penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Rumah Sakit yaitu mencapai 0,35 persen. Dengan demikian maka, bagi pemerintah Sleman mempunyai tugas untuk bisa menambah jumlah Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, berikut tenaga medis yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk aspek Lingkungan Hidup presentase Penanganan Sampah dengan Ditimbun mengalami penurunan dibandingkan dengan 2007. sementara yang Diangkut oleh petugas mengalami kenaikan volumenya, dan untuk yang didaur ulang tidak ada perubahan. hanya bertambah 0,16 persen saja. Padahal seharusnya, pemerintah Kabupaten Sleman mengintensifkan program Daur Ulang

sampah supaya sampah yang ada bisa dimanfaatkan baik untuk kerajinan maupun untuk pupuk organik. Terkait dengan Presentase Penduduk Berakses Air Minum, total keseluruhan Rumah Tangga (RT) yang memiliki Akses Air Minum adalah sebanyak 7,167 persen. Sekalipun demikian bukan berarti sisanya tidak Berakses Air Minum, melainkan mereka Berakses Air Minum dengan menggunakan sumur galian.

Dalam aspek Sarana dan Prasarana Umum, Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik adalah 28,9 persen dari panjang jalan yang ada di Kabupaten Sleman. Sementara Rasio Tempat Ibadah terhadap Penduduk mencapai 3,33 persen. Dengan demikian maka, kondisi jalan di Kabupaten Sleman masih banyak yang berada dalam kondisi tidak baik. Dan untuk Tempat Ibadah Rasionya masihlah cukup rendah, tidak menutup kemungkinan ada beberapa perkampungan warga yang tidak memiliki tempat peribadatan, baik untuk mereka yang beragama Islam, Katolik, Kristen, Budah, maupun Hindu. Dan adapun untuk Rasio TPS terhadap penduduk hanya mencapai 0,10 persen, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan dua aspek sebelumnya.

Terakhir dalam aspek Perhubungan, Jumlah Uji Kir Angkutan Umum kendaraan yang telah diuji kir mencapai 1.267 unit. Sementara terkait Jumlah Pelabuhan dan Terminal, untuk Laut di Kabupaten Sleman tidak terdapat, untuk udara di Kabupaten Sleman terdapat bandara Adisucipto. dan untuk terminal bus terdapat empat terminal. Dengan demikian, maka dilihat dari aspek Perhubungan Kabupaten Sleman memiliki keunggulan di antara kabupaten/ kota di DIY dengan keberadaan bandara Adisucipto sebagai tempat transit dan keberangkatan pesawat

yang menghubungkan antara Provinsi DIY dengan kota-kota besar lainnya baik di Indonesia maupun di Asia.

2. Pelayanan Penunjang

a. Penanaman Modal

Terkait dengan penanaman modal, yang mempunyai tiga aspek indikator yaitu: Jumlah investor bersekala nasional, jumlah investasi bersekala nasional, dan rasio daya serap tenaga kerja. Berdasarkan LPPD Tahun 2008 penulis hanya bisa menjelaskan bahwa pada tahun 2008 setidaknya terdapat 6 calon investor fasilitas yang telah mendapatkan surat persetujuan penanaman modal (SPPM) di Kabupaten Sleman. Dinamika investasi yang tumbuh cukup tinggi selama tahun 2008 adalah investasi non fasilitas. Investasi yang tidak menggunakan fasilitas keringanan pajak untuk bahan baku. Jumlah unit usaha investasi non fasilitas tahun 2008 sebanyak 27.783 unit usaha meningkat 7,13 persen. Peningkatan ini cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,39 persen. Peningkatan unit usaha tersebut diikuti pula dengan peningkatan nilai investasi sebesar 9 persen, sehingga mencapai Rp1,86 trilyun. Investasi non fasilitas telah menyerap 200.000 lebih tenaga kerja atau meningkat 3,85 persen dari tahun sebelumnya.

b. KUKM

Untuk KUK Presentase Koperasi Aktif Dilihat dari dinamika aktivitasnya terdapat 290 unit atau 49,4 persen yang aktif, 206 unit atau 35,09 persen pasif dan 91 unit atau 15,50% dikategorikan beku. Jumlah koperasi aktif meningkat 15,5

persen, jumlah koperasi pasif turun 8,25 persen dan jumlah koperasi beku menurun 2,19 persen¹⁴.

c. Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Terkait dengan rasio penduduk ber-KTP penulis hanya menemukan data mentah dimana pada tahun 2008 total keseluruhan pembuat KTP di Kabupaten Sleman sebanyak 243.766 orang. Hal ini mengalami kenaikan dari 216.320 orang pada tahun 2007. Sementara pada tahun 2006 sebanyak 194.636 orang, dan pada tahun 2005 sebanyak 198.859 orang. Untuk lebih jelasnya, lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.30
Jumlah Pelayanan KTP 2005-2008

Tahun	2005	2006	2007	2008
Jumlah Pelayanan	198,859	194,636	216,320	243,766

Sumber: Profil Informasi Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Sleman

Dengan demikian maka kondisi pelayanan KTP pada tahun 2008 jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2007.

2) Rasio Bayi Berakte Kelahiran dan Rasio Pasangan Berakte Nikah

Untuk melihat Rasio Bayi Berakte Kelahiran dan Rasio Pasangan Berakte Nikah, penulis hanya menemukan data mengenai jumlah pembuatan Akte Kelahiran Bayi dan Akte Pernikahan dari tahun 2005-2008. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, pada tahun 2008 pembuatan Akte Kelahiran untuk bayi sebanyak 18.623, tahun 2007 sebanyak 16,522, tahun 2006 sebanyak 14,271, dan

¹⁴ LPPD Kabupaten Sleman Tahun 2008

tahun 2005 sebanyak 15,877. Adapun untuk Akte Pernikahan pada tahun 2008 sebanyak 597 pasangan, tahun 2007 sebanyak 588, tahun 2006 sebanyak 948, dan tahun 2005 sebanyak 444 pasangan. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.31

Jumlah Pembuatan Akte Kelahiran dan Akte Pernikahan 2005-2008

Tahun	2005	2006	2007	2008
Akte Kelahiran	15,877	14,271	16,522	18,623
Akte Pernikahan	4,44	9,48	5,88	5,97

Profil Informasi Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Sleman

Dengan demikian maka baik untuk Akte Kelahiran ataupun Akte Pernikahan pelayanannya tahun 2008 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2007. Mengingat jumlah pelayanan tahun 2008 lebih besar dibandingkan tahun 2007.

d. Ketenagakerjaan

Aspek Ketenagakerjaan dilihat dari Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah jumlah keseluruhan Angkatan Kerja 15 tahun ke atas, dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja), dikali 1000. Terlebih dahulu penulis akan mengajikan data sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.32

Beberapa Variabel Ketenaga Kerjaan, 2008

Uraian	2008		
	Laki-laki	Perempuan	L + P
1. Penduduk Usia Kerja	416.113	411.916	828.029
2. Angkatan Kerja	320.817	245.843	566.659
- Bekerja	298.792	229.193	527.985
- Pengangguran Terbuka	22.024	16.650	38.674

Sumber: BPS Sleman, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2008

Berdasarkan data di atas, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 baik laki-laki maupun perempuan adalah sebanyak 828.029 orang. Sementara untuk Angkatan Kerjanya adalah sebanyak 566.659 orang. Maka Presentasinya adalah: $566.659 / 828.029 \times 1000 = 0,684$ persen. Maka Presentase Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 adalah sebesar 0,684 persen.

e. KB dan KS

Terkait KB dan KS dilihat dari Rasio Akseptor KB penulis hanya bisa menyajikan data jumlahnya melalui data provinsi. Di Kabupaten Sleman jumlah Akseptor KB Baru pada tahun 2008 mencapai 10.687 orang, dan untuk Akseptor Aktif di tahun yang sama mencapai 117.882 orang. Di banding kabupaten/ kota yang berada di Provinsi DIY, Akseptor Baru Kabupaten Sleman menempati posisi kedua terbanyak setelah Kabupaten Bantul yang mencapai 12.643 orang. Adapun dalam Akseptor Aktif Kabupaten Sleman menempati urutan pertama di antara kabupaten/ kota lainnya di Provinsi DIY.

Untuk Akseptor Baru yang Terendah adalah Kota Yogyakarta dengan 5.070 orang, disusul Kabupaten Kulonprogo dengan 5.805, dan kemudian Kabupaten Gunungkidul sebanyak 8.687 orang. Dalam Akseptor Aktif yang paling rendah angka penggunanya adalah Kota Yogyakarta dengan 35.000 orang, disusul Kabupaten Kulonprogo dengan 49.651 orang, kemudian Kabupaten Gunungkidul dengan 109.742 orang, dan Kabupaten Bantul dengan 113.595 orang. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.33

Jumlah Akseptor Keluarga Berencana menurut Kabupaten/ Kota di DIY,
2008

Kabupaten/ Kota	Akspetor Baru	Akseptor Aktif
1. Kulonprogo	5.805	49.651
2. Bantul	12.643	113.595
3. Gunungkidul	8.687	109.742
4. Sleman	10.642	117.882
5. Yogyakarta	5.070	35.000
Total	42.847	425.090

Sumber: BPS DIY, DIY dalam Angka 2009

Bila di presentasikan berdasarkan LPPD Tahun 2008 telah terjadi Peningkatan Dimana partisipasi masyarakat dalam program KB aktif mencapai 117.882 orang dengan peserta KB baru sebanyak 10.644 orang atau meningkat 1,42%. Dibandingkan dengan jumlah PUS sebanyak 147.379 pasangan, maka tingkat prevalensi peserta KB aktif mencapai 79,99 persen, naik 0,29% dari tahun 2007. Sementara keikutsertaan pria dalam KB sebanyak 8.087 peserta atau 6,86 persen dari peserta KB aktif¹⁵.

f. Komunikasi dan Informatika

1) Jumlah Jaringan Informasi

Berdasarkan data Potensi Desa 2008 dapatlah diambil kesimpulan bahwa telepon umum di Kabupaten Sleman sebanyak 3 buah, wartel sebanyak 76 buah, warnet sebanyak 26 buah, kantor pos sebanyak 24 buah dan pos keliling sebanyak 40 buah. Telepon umum terbanyak terdapat di Kecamatan Prambanan sebanyak 2 buah, wartel terbanyak terdapat di Kecamatan Tempel sebanyak 76 buah, warnet

¹⁵ LPPD Kabupaten Sleman Tahun 2008

terbanyak di Kecamatan Ngaglik sebanyak 5 buah, kantor pos terbanyak terdapat di Kecamatan Depok, Ngaglik, dan Pakem masing-masing sebanyak 3 buah. Dan pos keliling terbanyak terdapat di Kecamatan Godean sebanyak 6 buah. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.34
Jumlah Jaringan Komunikasi, 2008

Kecamatan	Jaringan/ Prasarana Komunikasi				
	Tel. Umum	Wartel	Warnet	Kantor Pos	Pos Keliling
Moyudan	0	4	0	1	1
Minggir	0	4	1	1	5
Seyegan	0	5	1	1	0
Godean	0	7	2	1	6
Gamping	0	5	3	2	0
Mlati	0	5	1	1	1
Depok	0	3	3	3	3
Berbah	0	3	0	1	0
Prambanan	2	4	1	1	4
Kalasan	0	4	2	1	0
Ngemplak	0	5	2	1	5
Ngaglik	0	6	5	3	3
Sleman	0	5	4	1	5
Tempel	0	7	1	1	0
Turi	0	1	0	1	2
Pakem	1	5	0	3	5
Cangkringan	0	3	0	1	0
Total	3	76	26	24	40

Sumber: BPS DIY, Potensi Desa Kabupaten Sleman 2008

2) Rasio Wartel/ Warnet terhadap Penduduk

Rasio wartel terhadap penduduk adalah total warnet keseluruhan di Kabupaten Sleman per jumlah penduduk Kabupaten Sleman, kali 1000: 76/

$1.040.220 \times 1000 = 0,0731$. Kemudian rasio warnet adalah sebagai berikut: 26/

$1.040.220 \times 1000 = 0,026$ persen.

g. Pertanahan

Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Sleman bisa digolongkan pada empat lima kategori yaitu; Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelola, dan Tanah Wakaf. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini.

Tabel 3.35

Jumlah Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sleman, 2008

Jenis Kepemilikan		- Bidang - m ²
Hak Milik	Jumlah	411.219
	Luas	250.082.394
Hak Guna Bangunan	Jumlah	23.486
	Luas	9.059.775
Hak Pakai	Jumlah	8.593
	Luas	19.538.196
Hak Pengelola	Jumlah	32
	Luas	449.457
Wakaf	Jumlah	778
	Luas	143.789

Sumber: Profil Informasi Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Sleman

Berdasarkan data di atas dapatlah dilihat bahwa tanah bersertifikat dalam kategori Hak Milik sebanyak 411.219 bidang dengan luas mencapai 250.082.394 m². Kemudian dalam kategori Hak Guna Bangunan jumlahnya mencapai 23.486 bidang dan luasnya mencapai 9.059.775 m². Dalam kategori Hak Pakai terdapat 8.593 bidang yang luasnya mencapai 19.538.196. Hak Pengelola sebanyak 32

bidang dengan luasnya mencapai 449.457 m². Dan Tanah Wakaf sebanyak 778 bidang dengan luas mencapai 143.789 m².

h. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Terkait dengan aspek pemberdayaan masyarakat dan desa yang terdiri dari aspek penilaian yaitu: Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK, dan Jumlah LSM. Penulis hanya bisa menyajikan data terkait dengan banyaknya LSM di Kabupaten Sleman saja. Mengenai banyaknya jumlah LSM di Kabupaten Sleman untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.36

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi DIY, 2008

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah LSM
1	Kulonprogo	7
2	Bantul	19
3	Gunungkidul	21
4	Sleman	19
5	Yogyakarta	34
Total		100

Sumber: BPS DIY, Statistik Potensi Desa DIY

Berdasarkan data di atas dapatlah dilihat bahwa total keseluruhan LSM yang terdapat di Provinsi DIY adalah sebanyak 100 LSM. Di Kabupaten Kulonprogo terdapat sebanyak 7 LSM. Di Kabupaten Bantul terdapat sebanyak 19 LSM. Di Gunungkidul terdapat sebanyak 21 LSM. Di Kota Yogyakarta sebanyak 34 LSM. Dan adapun di Kecamatan Sleman sendiri terdapat sebanyak 34 LSM.

i. Perpustakaan

1) Jumlah Perpustakaan

Berdasarkan LPPD, terkait dengan perpustakaan dalam pemerataan pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat dilakukan pengembangan kantong-kantong layanan di sekolah dan padukuhan serta pelayanan 3 mobil perpustakaan keliling. Jumlah perpustakaan yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mencapai 121 unit¹⁶.

2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Untuk pengunjung perpustakaan melalui pelayanan 3 unit mobil perpustakaan keliling pengunjungnya per hari mencapai 200-300 orang. Sementara jumlah pengunjung kantor perpustakaan dan arsip daerah yang berjumlah 121 unit adalah 150-200 orang per hari. Berarti baik dari 3 unit pelayanan mobil keliling, 121 kantor perpustakaan dan arsip daerah maka rata-rata total keseluruhan pengunjungnya adalah 350-500 orang per hari. Dengan demikian maka, andai jumlah hari dalam satu tahun adalah 365-52 (hari minggu+ hari libur) maka kurang lebih pengunjung perpustakaan rata-rata per tahunnya adalah $350-500 \times 300$ yaitu 105.000-150.000 orang.

j. Pemuda dan Olah Raga

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Sleman berdasarkan data Profil Informasi Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Sleman terdapat sebanyak 10

¹⁶ LPPD Kabupaten Sleman Tahun 2008

organisasi kepemudaan. Selain itu jumlah Karang Taruna yang ada berdasarkan data DIY dalam Angka 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37
Jumlah Karang Taruna (KT) di Provinsi DIY, 2008

Tahun	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2008	88	75	144	86	45

Sumber: BPS DIY. DIY dalam Angka 2009

Berdasarkan data di atas dapatlah dilihat bahwa pada tahun 2008 jumlah Karang Taruna terbanyak terdapat di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 144 organisasi kepemudaan Karang Taruna. Disusul kemudian oleh Kabupaten Kulonprogo sebanyak 88 organisasi Karang Taruna. Kemudian Kabupaten Sleman sebanyak 86 organisasi Karang Taruna. Bantul 75 organisasi Karang Taruna. Dan Kota Yogyakarta sebanyak 45 organisasi Karang Taruna.

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan jumlah, pada tahun 2005 sebanyak 28 organisasi, tahun 2006 29 organisasi, tahun 2007 33 organisasi, dan pada tahun 2008 menjadi 34 organisasi. Untuk lebih jelasnya, lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.38
Jumlah Organisasi Olahraga 2005-2008

Tahun	2005	2006	2007	2008
Banyaknya Organisasi	28	29	33	34

Sumber: Profil Informasi Pemerintahan BAPPDEA Kabupaten Sleman

Secara umum dalam analisis penulis aspek Pelayanan Penunjang dengan melihat aspek Penanaman Modal dan Iklim Investasi di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 mengalami peningkatan. Dimana jumlah unit usaha investasi non fasilitas meningkat menjadi 7,13 persen dari tahun 2007 yang hanya sebesar 4,39 persen. Diikuti dengan peningkatan nilai investasi 9 persen sehingga pada tahun 2008 mencapai Rp. 1,86 trilyun. Dengan peningkatan iklim investasi ini pada tahun 2008 mampu menyerap sebanyak 200.000 lebih tenaga kerja.

Untuk KUKM, Presentase Koprasi Aktif mencapai 15,50 persen. Penduduk yang ber-KTP jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2007, dimana tahun 2007 hanya sebanyak 216.636 dan untuk tahun 2008 mencapai 243.766 orang. Kenaikan ini tidaklah signifikan, mengingat jumlah usia 17 tahun setiap tahun tentunya mengalami kenaikan. Dan adapun untuk presentase Bayi Berakte Kelahiran dan Pasangan Berakte Pernikahan sama-sama mengalami kenaikan. Untuk Bayi Berakte Kelahiran dari 16,5222 persen tahun 2007 menjadi 18,628 persen pada tahun 2008. Untuk Akte Pernikahan dari 5,88 menjadi 5,97 persen.

Untuk aspek Ketenagakerjaan, dilihat dari Angka Partispasi Angkatan Kerja sangatlah rendah hanya mencapai 0,684 persen. Sementara untuk KB dan KS, Rasio Akseptor KB Kabupaten Sleman menempati posisi tertinggi di antara kabupaten/ kota di DIY dengan jumlah Akseptor Baru mencapai 10.642 orang dan Akseptor Aktif sebanyak 117.882 orang. Dan untuk Komunikasi dan Informatika, Jumlah Jaringan Informasi untuk Telepon Umum, Wartel, Warnet, Kantor Pos dan Pos Keliling keberadaannya hampir menyabar ada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Dengan Rasio Wartel dan Warnet terhadap Penduduk

mencapai 0,026 persen, masihlah cukup rendah. Padahal dengan kemajuan teknologi informasi seharusnya keberadaan Warnet semakin diperbanyak dengan memudahkan perijinan pendiriannya.

Dalam aspek Pertanahan, untuk tanah dalam kategori Hak Milik mencapai 411.219 bidang, Hak Guna Bangunan 23.486 bidang, Hak Pakai 8.593 bidang, Hak Pengelola 32 bidang, dan Tanah Wakaf sebanyak 778 bidang. Dengan komposisi demikian maka terjadi pemeratan dalam penggunaan tanah di Kabupaten Sleman. Untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilihat dari keberadaan LSM maka Kabupaten Sleman menempati posisi terendah kedua setelah Kulonprogo dengan hanya memiliki 19 LSM saja, hal ini menunjukkan belum terlalu pekanya kondisi masyarakat Kabupaten Sleman sebagai kekuatan sipil bila dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi DIY.

Untuk Perpustakaan telah mengalami kemajuan intensitas program melalui pengembangan kantong-kantong layanan baca di sekolah dan melalui mobil Perpustakaan Keliling ditambah juga dengan keberadaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang berjumlah 121 unit. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan rata-rata per tahunnya mencapai 105.000-150.000 orang. Angka pengunjung yang cukup tinggi. Dan adapun untuk Pemuda dan Olahraga, dilihat dari jumlah Karang Taruna Kabupaten Sleman masihlah berada di urutan ketiga (di provinsi DIY) setelah Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Dinas Pemuda dan Olahraga. Sementara jumlah Organisasi Olahraga pada tahun 2008 hanya bertambah satu organisasi saja, dari 33 organisasi pada tahun 2007 menjadi 34 organisasi pada tahun 2008.

C. Aspek Daya Saing Daerah

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Terkait Kemampuan Ekonomi Daerah, produktivitas total daerah dari 9 sektor yang ada yaitu: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Bangunan, Perdagangan, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, dan Jasa. Berdasarkan LPPD tahun 2008 Penulis hanya bisa menyajikan data mengenai produktivitas di sektor pertanian saja.

Pada tahun 2008 produksi dan produktivitas hampir semua komoditas pertanian tanaman pangan meningkat dibandingkan tahun 2007. Produksi padi mencapai 268.928 ton (meningkat 10,73 persen), dengan produktivitas mencapai 8,7 ton/ ha atau meningkat 8,7 persen, padi ladang mencapai 3 ton/ ha atau meningkat 32,09 persen. Dengan produksi tersebut menjadikan Sleman surplus beras 96.571 ton. Produksi jagung meningkat 16,02 persen menjadi 30.896 ton dengan produktivitas sebesar 8 ton /ha meningkat 36,03 persen. Produksi kedelai mencapai 1.130 ton meningkat 60,28 persen dengan produktivitas sebesar 1,8 ton/ha meningkat 17,99 persen. Produksi pisang meningkat 2,51 persen, produksi cabe meningkat 0,35 persen dan produksi kacang panjang meningkat 40,74 persen.

Populasi ternak di Sleman meningkat kecuali untuk jenis sapi perah yang populasinya turun 2,22 persen menjadi 5.465 ekor dan kerbau turun 2,50 persen menjadi 3.387 ekor. Peningkatan populasi terjadi pada ayam petelur meningkat 22,36 persen menjadi sebanyak 1,88 juta ekor, Populasi domba meningkat 20,98 persen menjadi sebanyak 68.955 ekor dan ayam pedaging meningkat 4,26 persen

menjadi sebanyak 2,79 juta. Sementara di bidang perkebunan produksi tembakau *virginia*, *vorstenland* dan tembakau rakyat sebesar 9.185 kuintal, tebu sebanyak 53.907 kuintal, kopi robusta, arabika dan kartika sebanyak 861 kuintal, mendong sebanyak 30.325 kuintal dan nilam sebanyak 60 kuintal.

2. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

a. Akseibilitas Daerah

Dilihat dari Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan. Berdasarkan DIY dalam Angka 2009, panjang jalan Kabupaten Kulonprogo adalah 158,50 km, Bantul 154,05 km, Gunungkidul 275,91 km, sementara Yogyakarta tidak diketahui, dan Kabupaten Sleman sepanjang 11,839 km. Jarak jalan terpanjang terdapat di Kabupaten Gunungkidul dengan panjang sepanjang 275,91 km. sementara jarak jalan terpendek terdapat di Kabupaten Sleman. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.39
Panjang Jalan per Kabupaten/ Kota di DIY 2008

No	Kabupaten	Panjang Jalan
1	Kulonprogo	158,50
2	Bantul	154,05
3	Gunungkidul	275,91
4	Sleman	118,39
5	Yogyakarta	-

Sumber: BPS DIY, DIY dalam Angka 2009

Selanjutnya terkait dengan jumlah kendaraan, jumlah kendaraan terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman dengan total jumlah kendaraan sebanyak 454.080, disusul kemudian oleh Kota Yogyakarta dengan jumlah kendaraan sebanyak

327.601, kemudian Kabupaten Bantul sebanyak 292.895, kemudian Kabupaten Gunungkidul dengan 109.838 kendaraan, dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah kendaraan sebanyak 91.895. Total keseluruhan kendaraan yang terdapat di Provinsi DIY adalah sebanyak 1.276.601 kendaraan.¹⁷

Untuk mengetahui Presentase Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan adalah Panjang Jalan dibagi Jumlah Kendaraan. Berdasarkan data di atas, panjang jalan di Kabupaten Sleman 11,839 km sementara banyaknya kendaraan 454.080 unit, maka presentasinya adalah $11,839 / 454.080 = 0,026$ persen. Jadi Presentase Panjang per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 adalah sebesar 0,026 persen.

Dengan demikian maka bukan berarti panjang jalan di Kabupaten Sleman pendek, tetapi hal itu terjadi sebagai akibat terlalu banyaknya jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Sleman. Padahal di sisi lain angka kemiskinan begitu tinggi, begitupun angka ketimpangan kemamuran. Oleh karenanya, dengan tingginya animo masyarakat untuk membeli kendaraan terutama roda dua, maka seharusnya bagi pemerintah Kabupaten Sleman untuk melakukan pembatasan terhadap masyarakat dalam kepemilikan kendaraan pribadi. Tentunya dengan memberikan solusi seperti memperbaiki keberadaan dan fasilitas kendaraan angkutan umum secara professional demi kenyamanan masyarakat.

¹⁷ BPS DIY, DIY dalam Angka 2009

b. Ketersediaan Air Bersih

Presentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih adalah Jumlah RT yang Berakses Air Bersih per Jumlah RT. Berdasarkan Data Informasi Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Sleman total RT yang berakses air minum pada tahun 2008 sebanyak 18.314 RT. Adapun pada tahun 2008 total keseluruhan RT di Kabupaten Sleman sebanyak 255.557, maka perhitungannya adalah sebagai berikut: $18.314 / 255.557 \times 100 = 7,17$ persen. Jadi Presentase RT yang menggunakan air bersih di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 adalah sebesar 7,17 persen.

c. Fasilitas Listrik

Terkait dengan ketersediaan daya listrik dan presentase rumah tangga yang menggunakan listrik, Daya listrik yang terpakai di Kabupaten Sleman andai melihat penggunaan yang digunakan oleh RT adalah sebesar 337.901.885 VA, tentunya andai ada data dari sektor industry akan lebih besar lagi. Adapun total keseluruhan RT yang menggunakan jasa listrik dari PLN dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 262.540 RT. Dimana RT pengguna terbanyak terdapat di Kecamatan Depok yaitu sebanyak 46.761 RT dengan jumlah VA sebesar 112.477.947, hal ini nampaknya sangat wajar, mengiangat Kecamatan Depok merupakan kecamatan yang paling pada penduduknya di antara 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.40

Rumah Tangga Pelanggan Listrik dan VA Daya Listrik, 2008

No	Kecamatan	Jumlah RT	VA Tersambung (Tersedia)
1	Moyudan	8.946	5.219.690
2	Minggir	7.298	4.587.830
3	Seyegan	9.321	5.885.250
4	Godean	14.281	12.390.238
5	Gamping	23.583	28.824.496
6	Mlati	21.367	32.234.710
7	Depok	46.761	112.477.947
8	Berbah	11.082	8.040.850
9	Prambanan	10.570	7.148.710
10	Kalasan	18.766	16.391.650
11	Ngemplak	13.680	11.348.700
12	Ngaglik	28.664	33.644.488
13	Sleman	15.074	31.181.206
14	Tempel	10.998	10.900.960
15	Turi	7.434	5.003.580
16	Pakem	8.631	8.884.430
17	Cangkringan	6.084	3.737.150
Total		262.540	337.901.885

Sumber: BPS DIY, Sleman dalam Angka 2008

d. Ketersediaan Restoran

Jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Sleman dari tahun 2005-2008 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2005 jumlah restoran sebanyak 25 buah dan rumah makan sebanyak 125 buah. Pada tahun 2006 jumlah restoran menjadi 35 buah dan rumah makan sebanyak 164 buah. Pada tahun 2007 jumlah restoran bertambah lagi menjadi 47 buah sementara rumah makan menjadi 177 buah. Dan adapun pada tahun 2008 jumlah restoran menjadi 51 buah, dan rumah makan menjadi 196 buah. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.41

Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Sleman 2005-2008

Tahun	2005	2006	2007	2008
Restoran	25	35	47	51
Rumah Makan	125	164	177	196
Total	150	199	324	247

Sumber: Profil Informasi Pemerintahan BAPPEDA Kab. Sleman

e. Ketersediaan Penginapan

Dari data Profil Informasi BAPPEDA tahun 2008 dapatlah dilihat total keseluruhan hotel baik bintang maupun melati dari tahun 2005-2008 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2005 jumlahnya hanya sebanyak 84 buah, bertambah kemudian pada tahun 2006 menjadi 93 buah, dan pada tahun 2007 menjadi 105 buah. Di tahun 2008 sendiri jumlahnya menjadi sebanyak 109 buah. Selain itu dalam data yang sama, penulis menemukan jumlah kamar hotel berbintang pada tahun 2005 sebanyak 1.029 kamar, sama jumlahnya dengan tahun 2006. Adapun pada tahun 2007 jumlahnya bertambah menjadi 1.548, dan pada tahun 2008 menjadi 1.548. Adapun untuk jumlah kamar hotel melati pada tahun 2005 terdapat sebanyak 1.406, tahun 2007 menjadi 1.439, tahun 2008 menjadi 1.778, dan pada tahun 2008 menjadi 1.861 kamar. Berikut ini penulis akan menyajikan datanya.

Tabel 3.42

Jumlah Hotel berdasar Jenisnya di Kabupaten Sleman, 2005-2008 (Buah)

Jenis Hotel	2005	2006	2007	2008
Hotel Berbintang Lima	-	-	2	2
Hotel Berbintang Empat	4	4	4	4
Hotel Berbintang Tiga	2	2	3	3
Hotel Berbintang Dua	-	-	-	-
Hotel Berbintang Satu	5	5	5	5
Hotel Melati III	3	3	4	4
Hotel Melati II	12	13	15	15
Hotel Melati I	58	67	75	79
Jumlah Total	84	93	105	109

Sumber: Profil Informasi Pemerintahan BAPPEDA Kab. Sleman

Secara umum, aspek Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur dilihat dari Rasio Jalan Raya Kabupaten Sleman rasionya adalah sebesar 0,026 persen, adapun untuk panjang jalannya, Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang terpendek apabila dibandingkan dengan kabupaten yang berada di Provinsi DIY, sementara untuk Kota Yogyakarta sendiri jarak panjangnya tidak diketahui. Dengan demikian, sebagai daerah yang memiliki panjang jalan yang terpendek di Provinsi DIY maka perlu adanya perpanjangan jalan untuk menyeimbangkan dengan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Sleman. Sementara untuk presentase RT yang menggunakan air bersih adalah sebanyak 7,17 persen, berarti menunjukkan masih rendahnya jumlah RT yang menggunakan fasilitas air bersih di Kabupaten Sleman.

Untuk RT yang menggunakan fasilitas listrik di Kabupaten Sleman cukuplah merata, dari total keseluruhan 17 kecamatan mencapai 262.540 RT dengan jumlah voltase mencapai 337.901.885 VA. Sementara untuk ketersediaan Restoran tahun 2008 jumlahnya mencapai 51 buah, sebelumnya tahun 2007 hanya 47 buah, berarti mengalami penambahan selama satu tahun sebanyak 4 buah. Dan adapun dalam hal ketersediaan penginapan, untuk Hotel Bintang 5 tidak mengalami penambahan dari tahun 2007-2008, bahkan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya stagnasi dalam bisnis perhotelan di Kabupaten Sleman.

3. Iklim Berinvestasi

a. Keamanan dan Ketertiban

1) Angka Kriminalitas

Terkait dengan aspek kriminalitas maka yang dilihat adalah angka kriminalitas di Kabupaten Sleman selama satu tahun. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, dari Sleman dalam Angka 2008. Angka kriminalitas tertinggi adalah dalam jenis narkoba yang mencapai 52 laporan dan 62 kasus yang terselesaikan. Hal ini jauh bertolak belakang dengan angka kriminalitas tahun 2007, dimana kasus narkoba tidak ada sama-sekali. Disusul kemudian kebakaran dengan laporan sebanyak 23 kasus dan terselesaikan 22 kasus, hampir sama dengan yang terjadi di tahun 2007 dengan laporan 22 kasus dan terselesaikan 22 kasus. Kemudian kasus uang palsu yang terjadi hanya satu kali di bulan November dan terselesaikan di bulan Desember. Dan terakhir adalah kriminalitas pembunuhan, yang cukup signifikan perbaikannya dimana pada tahun 2008 tidak ada kasus

pembunuhan, berbeda dengan tahun 2007 dimana pembunuhan terjadi 3 kali dalam setahun.

Tabel 3.43

Banyaknya Tindak Kriminalitas menurut Jenisnya per Bulan, 2008

Bulan	Kebakaran		Uang Palsu		Narkoba		Bunuh		Anirat	
	L ¹⁸	S ¹⁹	L	S	L	S	L	S	L	S
Januari	2	2	0	0	4	13	0	0	0	0
Pebruari	1	1	0	0	7	11	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
April	2	1	0	0	5	8	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
Juni	3	3	0	0	5	10	0	0	0	0
Juli	2	2	0	0	0	9	0	0	0	0
Agustus	4	4	0	0	6	4	0	0	0	0
September	3	3	0	0	6	2	0	0	0	0
Oktober	2	2	0	0	1	3	0	0	0	0
November	1	1	1	0	2	5	0	0	0	0
Desember	3	3	0	1	5	2	0	0	0	0
Jumlah	23	22	1	1	52	62	0	0	0	0
Tahun 2007	22	22	1	0	0	0	3	3	0	0

Sumber: BPS DIY, Sleman dalam Angka 2009

2) Jumlah Demo

Terkait dengan jumlah demo, maka total demo yang terjadi selama tahun 2008 adalah sebanyak 99 kali. terdiri dari demo dibidang politik sebanyak 19 kali, bidang ekonomi 37 kali, dan sosial sebanyak 43 kali. Setiap tahun volume demonstrasi terus meningkat, mengingat pada tahun 2007 demonstrasi hanya

¹⁸ L = Laporan

¹⁹ S = Selesai

terjadi sebanyak 66 kali, terdiri dari demonstrasi dalam bidang politik sebanyak 33 kali, ekonomi sebanyak 37 kali, dan sosial sebanyak 43 kali. Adapun pada tahun 2006 terjadi sebanyak 18 kali, 3 kali dalam bidang politik, 11 kali dalam bidang ekonomi, dan 4 kali dalam bidang sosial. Dan terakhir pada tahun 2005 demo terjadi sebanyak 18 kali, 4 kali untuk bidang politik dan 14 kali untuk bidang sosial. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel data berikut ini:

Tabel 3.44

Jumlah Demonstrasi Berdasarkan Klasifikasi Isu 2005-2008

Tahun		2005	2006	2007	2008
Jenis Demonstrasi	Politik	4	3	33	19
	Ekonomi	14	11	18	37
	Sosial	-	4	15	43
Total		18	18	66	99

Sumber: Profil Informasi Pemerintahan BAPPEDA Kab. Sleman

b. Pengenaan Pajak Daerah

Jenis pajak di Kabupaten Sleman kurang lebih adalah sebanyak 7 jenis, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan BGGC, dan pajak parkir. Total keseluruhan pajak yang diperoleh oleh kabupaten selama tahun 2008 dari keseluruhan pajak yang ada adalah sebesar Rp. 157.604.530.382.84. Dimana perolehan terbesar diperoleh dari pajak penerangan jalan sebesar Rp. 31,190,111,489.00, sementara yang terendah diperoleh dari pajak parkir sebesar Rp. 7,253,946.50.

Tabel 3.45
Total Pajak berdasarkan Jenisnya, di Kabupaten Sleman
Tahun 2008

No	Jenis Pajak	Jumlah Uang (Dalam Rupiah)
1	Pajak hotel	18,189,624,204.48
2	Pajak Restoran	7,628,940,657.53
3	Pajak Hiburan	3,637,358,441.16
4	Pajak Reklame	9,010,860,114.49
5	Pajak Penerangan Jalan	31,190,111,489.00
6	Pajak Pengambilan dan Pengelolaan BGGC	662,441,550.00
7	Pajak Parkir	7,253,946.50
Total		157.604.530.382.84

Sumber: Profil Informasi Pemerintahan BAPPEDA Kab. Sleman

Kemudian di Kabupaten Sleman terdapat 25 jenis retribusi, adapun total keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari retribusi selama tahun 2008 adalah sebesar Rp. 51,057,109,057.93. Sumbangan retribusi terbesar disumbangkan oleh retribusi kesehatan sebesar Rp. 29,866,288,253.93, dan adapun sumbangan terkecil diperoleh dari retribusi pembuangan limbah sebesar Rp. 3,188,000.00. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.46

Total Pajak berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Sleman, 2008

No	Jenis Retribusi	Jumlah Uang
1	Retribusi pelayanan kesehatan	29,866,288,253.93
2	Retribusi persampahan/kebersihan	667,660,500.00
3	Retribusi penggantian biaya cetak KTP	1,352,612,700.00
4	Retribusi Parkir	331,548,000.00
5	Retribusi Pasar	2,850,023,050.00
6	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	915,822,000.00
7	Retribusi penggunaan kekayaan Daerah	471,456,800.00
8	Retribusi Terminal	296,454,500.00
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	55,014,750.00
10	Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	630,575,190.00
11	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	183,352,050.00
12	Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah	6,201,260,388.00
13	Retribusi IMB	2,955,793,076.00
14	Retribusi izin gangguan (HO)	694,485,000.00
15	Retribusi izin trayek	8,160,000.00
16	Retribusi izin usaha jasa konstruksi	18,662,500.00
17	Retribusi izin usaha perdagangan	110,280,000.00
18	Retribusi izin usaha perindustrian	11,375,000.00
19	Retribusi palatihan kerja swadana	47,504,000.00
20	Izin pendirian Tower	3,251,250,000.00
21	UPTD Pasar Hewan Gamping	124,333,300.00
22	Retribusi Ijin Prmuwisata	13,200,000.00
23	Retribusi Pembuangan Limbah	3,188,000.00
24	Retribusi cetak foto / peta	5,175,000.00
25	Retribusi Pemakaman	-
Total		51,057,109,057.93

Sumber: Profil Informasi Pemerintahan BAPPEDA Kab. Sleman

c. Perda

Pada tahun 2008 berdasarkan hasil penelaahan yang penulis lakukan terhadap produk hukum di tahun 2008, total keseluruhan Perda yang diundangkan sebanyak 8 Perda. Dan jumlah perda yang mendukung iklim usaha adalah

sebanyak 2 Perda terdiri dari: Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Sleman, Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Status Desa

Mengenai status desa penulis merujuk pada LPPD tahun 2008. Dimana dalam LPPD terkait dengan pembangunan Desa dijelaskan bahwa untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa telah diberikan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 9,74 milyar. Upaya lain untuk pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, diberikan dana bagi hasil kepada pemerintah desa yang meliputi Dana Penyeimbang Desa (Pengembalian Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar Rp3,72 milyar, Pengembalian Bea Perolehan dari Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 1,65 milyar serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 5,06 milyar.

Penggunaan dana bagi hasil tersebut diperuntukan sebagai stimulan pembangunan di tingkat pedukuhan disamping untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Fasilitas yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dan lembaga desa, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan bantuan kepada pemerintah desa sebesar Rp17,54 milyar yang meliputi Tunjangan bagi Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, operasional dukuh, bantuan RT/RW, bantuan pemilihan kepala desa, pemilihan dukuh, hadiah lunas PBB, penghargaan kepala desa yang habis masa jabatan, bantuan lumbung pangan dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat untuk kepala desa dan perangkat desa.

Upaya memacu pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengalokasikan Dana Gotong Royong, bantuan aspal dan TMMD. Dana tersebut diperuntukan menstimulasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, sistem pengelolaan air hujan, tempat ibadah, pengairan dan pasar desa yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. Pada tahun 2008 pun dialokasikan dana sebesar Rp. 9,80 milyar yang terdiri dari bantuan gotong royong sebesar Rp. 5,48 milyar, TMMD sebesar Rp. 120 juta dan bantuan aspal sebesar Rp. 4,20 milyar. Dibandingkan tahun sebelumnya alokasi dana tersebut meningkat 99,77 persen. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 3.159 proposal masyarakat dan mampu menggali partisipasi sebesar 41,38 persen atau Rp. 46,15 milyar.

Maka dilihat dari aspek Iklim Berinvestasi untuk Angka Kriminalitas di Kabupaten Sleman antara tahun 2007 dan 2008 tidaklah terjadi pengurangan angka kriminalitasnya, bahkan untuk kasus narkoba bertambah dengan angka yang cukup signifikan. Untuk jumlah demonstrasi dalam issue politik tahun 2008 lebih kondusif dibandingkan dengan tahun 2007, sementara untuk issue sosial dan ekonomi tahun 2008 mengalami peningkatan jumlah demonstrasi yang cukup besar. Hal ini bisa menjadi ukuran bahwa Kabupaten Sleman tahun 2007 sebetulnya jauh lebih kondusif dibandingkan dengan tahun 2008. Dimana pada tahun 2007 jumlah demonstrasi sebanyak 66 kali, sedangkan tahun 2008 mencapai 99 kali.

Hal lain yang menunjang Iklim Berinvestasi adalah Pengenaan Pajak Daerah. Berkenaan dengan Pengenaan Pajak Daerah, pada tahun 2008 total

keseluruhan pajak yang diperoleh Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp. 157. 604. 530. 328.84. Berdasarkan jenisnya, yang terbesar diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hotel, sementara yang terendah adalah dari Pajak Parkir. Dengan demikian, maka untuk Pengenaan Pajak bagi investor yang berinvestasi di Kabupaten Sleman dalam sektor industri, restoran, dan hotel tidak terlalu bermasalah. Hal ini terbukti dengan fakta dimana Pajak Penerangan Jalan yang menjadi penyumbang terbesar untuk Perpajakan di Kabupaten Sleman. Dan hal lain sebagai pendukung Iklim Berinvestasi, pada tahun 2008 muncul dua Perda No. 2 Tentang Perusahaan Daerah BPR dan Perda No. 7 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja

Untuk melihat kualitas tenaga kerja bisa dilihat dari data klasifikasi tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan terakhirnya. Dalam data berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Sleman, jumlah tenaga kerja lulusan D IV dan S1 untuk penduduk perempuan adalah sebesar 7,66 persen atau 31,664 orang, sementara lulusan S2 dan S3 sebesar 0,94 persen atau 3,889. Sementara untuk penduduk laki-laki sebesar 7,71 persen atau sebanyak 31,753 orang dalam jenjang D IV dan S1, untuk lulusan S2 dan S3 sebesar 0.50 persen atau sebanyak 2,056 orang. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.47

Jumlah dan Rasio Tenaga Kerja Lulusan S1, S2, dan S3 di Kabupaten Sleman menurut Jenis Kelamin, Tahun 2008

Ijazah	Jenis Kelamin			
	Laki-laki		Perempuan	
	Banyaknya	%	Banyaknya	%
D IV/ S1	31,664	7.61	31,753	7.71
S2/ S3	3,889	0,94	2,056	0.50

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman, 2008

b. Tingkat Ketergantungan

Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat, tingkat ketergantungan penduduk pada tahun 2008 berdasarkan kelompok usia 0-14 tahun untuk laki-laki sebesar 21.92 persen sedangkan perempuan sebesar 18,80 persen. Sementara usia 15-64 tahun untuk laki-laki sebesar 70,49 persen sedangkan perempuan 69,48 persen. Dan untuk usia 65+ untuk laki-laki sebesar 10,71 persen, sedangkan perempuan sebesar 8,59 persen. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.48

Komposisi Penduduk Ketergantungan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2008

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			
	Laki-laki		Perempuan	
	Banyaknya	%	Banyaknya	%
0-14	116,832	21.92	95,360	18.80
15-64	370,316	69.48	357,594	70.49
65+	45,796	8.59	54,322	10.71
Jumlah	532,945	100.00	507,275	100.00

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman, 2008

Maka dilihat dari aspek Sumber Daya Manusia kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sangat baik, dimana tenaga kerja yang berpendidikan D IV/ S1 mencapai 7,66 persen, dan untuk yang berpendidikan S2/ S3 mencapau 0,72 persen. Sementara untuk Tingkat Ketergantungan penduduk dengan kelompok umur produktif 15-64 tahun masihlah cukup tinggi dimana untuk laki-laki mencapai 69.48 persen dan perempuan mencapai 70.49 persen. Hal itu menunjukkan bahwa untuk penduduk laki-laki setiap 100 penduduk laki-laki produktif menanggung beban hampir 69 orang, dan setiap 100 produktif perempuan menanggung beban hampir 70 orang. Hal ini terjadi sebagai dampak dari banyaknya tenaga produktif yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan, usia produktif yang masih sekolah, dan banyaknya lansia. Oleh karenanya, tentunya mesti ada tindakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, untuk menjadikan usia produktif benar-benar produktif dengan menjadikannya sebagai tenaga kerja dan melakukan pemberdayaan terhadap lansia, seperti pemberdayaan lansia yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang. Dimana lansia yang ada bisa produktif dengan dberikan pelatihan keterampilan.